



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2019

EVALUASI PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN PROSPEK

Tahun Anggaran 2019



PROGRAM STRATEGIS PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KELEMBAGAAN KAMPUNG

Evaluasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Prospek

Tahun Anggaran 2019

Evaluasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Prospek

Tahun Anggaran 2019



**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemerintah Provinsi Papua
2019**

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, karena hanya melalui pertolongan-Nya maka dokumen *Evaluasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Prospek – Tahun Anggaran 2019* ini dapat tersusun dengan baik. Penyusunan dokumen ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian kinerja penyelenggaraan pelaksanaan Dana Prospek Papua selama periode 2014–2018, sehingga dapat diberikan suatu rekomendasi kebijakan yang strategis dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan dana Otsus Prospek di masa mendatang.

Dokumen *Evaluasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Prospek – Tahun Anggaran 2019* ini disusun atas kerja sama yang baik sekaligus konstruktif, edukatif dan koordinatif antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua, dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan pemerintah kabupaten

penerima program, dan Pusat Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEUDA) Universitas Cenderawasih.

Untuk itu disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya dokumen evaluasi ini dengan baik. Selanjutnya, dokumen ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan acuan dalam memutuskan keberlanjutan Program Prospek di masa mendatang.

Jayapura, Desember 2019
Kepala BAPPEDA Provinsi Papua



Yohanes Walid, S.Sos., M.Si.
NIP 19700728 199712 1 001

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar	xiv
Daftar Lampiran	xv
 BAB I	
Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Evaluasi.....	4
1.3. Sasaran Pelaksanaan Evaluasi.....	5
1.4. Landasan Hukum.....	5
1.5. Sistematika Penulisan	7

BAB II

Metode Evaluasi	9
2.1. Prinsip-Prinsip Dasar Evaluasi	9
2.2. Ruang Lingkup	10
2.3. Manajemen Data.....	10
2.4. Pendekatan Evaluasi	11
2.5. Proses Pelaksanaan Evaluasi.....	13
2.6. Teknik Sampling Evaluasi Prospek.....	16
2.7. Metoda Analisa	17
2.7.1. Model Data Panel	18
2.7.2. Deskriptif Kuantitatif	19
2.7.3. Deskriptif Kualitatif.....	22

BAB III

Profil Makro Sosial Ekonomi Dan Dana Prospek Papua.....	25
3.1. Kualitas Pembangunan Manusia.....	25
3.2. Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran.....	35
3.3. Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Per Kapita ..	39

BAB IV

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Dana Prospek Papua	43
4.1. Tujuan dan Arah Kebijakan Umum Prospek Papua ..	43
4.2. Pengelolaan Dana Prospek Papua.....	46
4.2.1. Alokasi Total Dana Prospek Menurut Kabu paten/Kota	46
4.2.2. Peranan Dana Prospek Terhadap Pendapatan Kampung	52

4.3. Pengaruh Dana Prospek Terhadap Pembangunan Sosial Ekonomi Provinsi Papua	54
4.3.1. Analisis Kuantitatif	56
4.3.1.1. Analisis Pengaruh Dana Prospek Terhadap IPM	59
4.3.1.2. Analisis Pengaruh Dana Prospek Terhadap Kemiskinan	60
4.3.1.3. Analisis Pengaruh Dana Prospek Terhadap Pendapatan Per Kapita	60
4.3.1.4. Analisis Pengaruh Dana Prospek Terhadap Indeks Pembangunan Desa (IPD)	61
4.3.1.5. Rekapitulasi Pengaruh Dana Prospek Terhadap IPM, Kemiskinan, Pendapatan Per Kapita, dan Indeks Pembangunan Desa	62
4.3.2. Analisis Kualitatif	64
4.3.2.1. Pencapaian Kinerja Program Prospek	66
4.3.2.2. Regulasi Dan SOP/Juknis/Juklak Program	67
4.3.2.3. Sumber Daya Manusia Pelaksana Program	67
4.3.2.4. Perencanaan dan Penganggaran Program/Kegiatan	74
4.3.2.5. Pelaksanaan Program/Kegiatan	75
4.3.2.6. Pengawasan Program/Kegiatan	76
4.3.2.7. <i>Monitoring</i> Dan Evaluasi	76

BAB V

Isu-Isu Strategis Dan Rekomendasi Kebijakan..... 81

5.1. Isu-Isu Strategis 81

5.2. Rekomendasi Kebijakan..... 83

BAB V

Penutup 87

6.1. Kesimpulan 87

6.2. Saran 88

Daftar Pustaka 91

Lampiran-lampiran 95

Daftar Tabel

Tabel 2.1.	Perencanaan Evaluasi.....	13
Tabel 2.2.	Lokasi Pengambilan Sampel.....	16
Tabel 2.3.	Kisi-Kisi Instrumen Evaluasi Prospek Papua	20
Tabel 3.1.	Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2013–2018.....	26
Tabel 3.2.	Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Papua Tahun 2013–2018.....	29
Tabel 3.3.	Pengeluaran Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2013–2018.....	31
Tabel 3.4.	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabu- paten/Kota Provinsi Papua Tahun 2013–2018	33
Tabel 3.5.	Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2013–2018.....	35

Tabel 3.6.	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2013–2018	37
Tabel 3.7.	Laju Pertumbuhan Ekonomi HK 2010 Dengan Tambang Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2013–2017	39
Tabel 3.8.	Pendapatan Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Tambang Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2013–2017	41
Tabel 4.1.	Kabupaten Penerima dan Pengelola Dana Prospek Tahun 2016–2018	46
Tabel 4.2.	Alokasi Dana Prospek Menurut Wilayah Adat Ha Anim Periode 2016–2018	48
Tabel 4.3.	Alokasi Dana Prospek Menurut Wilayah Adat La Pago Periode 2016–2018	49
Tabel 4.4.	Alokasi Dana Prospek Menurut Wilayah Adat Me Pago Periode 2016–2018	50
Tabel 4.5.	Alokasi Dana Prospek Menurut Wilayah Adat Saireri Periode 2016–2018.....	51
Tabel 4.6.	Alokasi Dana Prospek Menurut Wilayah Adat Mamta Periode 2016–2018	51
Tabel 4.7.	Rerata Pendapatan Kampung Yang Bersumber Dari Dana Prospek Periode 2016–2018	53
Tabel 4.8.	Analisis Statistik Model Panel Data Pengaruh Dana Prospek Terhadap Indikator Makro Papua	57
Tabel 4.9.	Pengaruh, Efektivitas dan Kontribusi Dana Prospek Terhadap Indikator Makro Sosial Ekonomi Provinsi Papua	62

Tabel 4.10. Pelaku Dan Peran Program Prospek	68
Tabel 4.11. Pemetaan Hambatan/Permasalahan Pengelolaan Dana Prospek di Provinsi Papua	76

Daftar Gambar

Gambar 2.1. Desain Model <i>Sequential Explanatory</i>	12
Gambar 2.2. Tahapan Dan Rancangan Jadwal Evaluasi	15
Gambar 2.3. Analisis Model Data Panel.....	18
Gambar 2.4. Aspek-Aspek Evaluasi Program Prospek Papua Tahun 2014–2018.....	19
Gambar 2.5. Model Miles Dan Huberman.....	23

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Dana prospek Papua.....	80
Lampiran 2. Dana prospek Provinsi Papua Tahun 2014–2018	95
Lampiran 3. Data Pembentukan Model Data Panel	99
Lampiran 4. Estimasi Model Data Panel	104

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Beranjak dari pemikiran bahwa pembagian Dana Otsus sepatutnya menggunakan asas keadilan dan pemerataan, serta memperhatikan kinerja *output*, *outcome* dan *impact* yang dihasilkan dalam pengelolaan Dana Otsus sebelumnya (Periode 2002–2013) kurang optimal, maka pada masa pemerintahan Gubernur/Wakil Gubernur Lukas Enembe dan Klemen Tinal (2013–2018) pembagian Dana Otsus diubah menjadi 80% untuk pemerintah kabupaten/kota dan 20% untuk pemerintah provinsi. Pembagian tersebut setelah terlebih dahulu mengalokasikan dana untuk Urusan Bersama yaitu Program Gerbangmas Hasrat Papua, Kartu Papua Sehat, Perumahan Rakyat, dan Prospek. Harapannya, melalui alokasi Dana Otsus seperti itu

semua pemerintah kabupaten/kota akan menjadi lebih leluasa berkreasi dan berinovasi untuk mengelola Dana Otsus dalam upaya mempercepat kemajuan wilayah Papua dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia. Harapan lainnya adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua menjadi di atas rata-rata nasional, serta untuk semakin memperluas kesempatan atau peluang usaha bagi Orang Asli Papua, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Selanjutnya untuk memastikan bahwa pengelolaan Dana Otsus dilaksanakan sesuai yang diharapkan, maka pada akhir tahun 2013 telah disahkan Perdasus Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan Dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus, yang diikuti dengan turunannya baik itu di tahun 2013, 2014 maupun 2015 dalam berbagai bentuk Peraturan Gubernur dan Surat Keputusan Gubernur seperti Peraturan Gubernur tentang jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat Papua, sistem rujukan pelayanan kesehatan, penggunaan Dana Otsus Untuk Pendidikan, Prospek, Gerbangmas, pedoman pengelolaan Dana Otsus, dan sebagainya, atau Surat Keputusan Gubernur tentang bantuan untuk lembaga keagamaan, bantuan sosial kepada Fasyankes, penerima belanja program strategi pembangunan ekonomi dan kelembagaan kampung, dan lain-lain.

Perubahan kebijakan pengelolaan Dana Otsus yang lebih terarah, terfokus, normatif, adil dan merata selama masa pemerintahan Gubernur/Wakil Gubernur Lukas Enembe dan Klemen Tinal terindikasi ada dampaknya yang signifikan. Fakta ini ditunjukkan dengan sebagian besar yang direncanakan dalam pembangunan sudah dapat terlampaui. Misalkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Papua melampaui

rata-rata nasional selama periode 2013–2018 yaitu 6,78% per tahun. Kemudian pendapatan per kapita naik 9,40% per tahun selama periode 2013–2018. Adapun untuk ketimpangan pendapatan dapat dikurangi dari 0,41 pada tahun 2013 hingga menjadi 0,37 pada tahun 2018. Selain itu pada tahun 2018 kemiskinan dapat direduksi sebesar -3,78% dibandingkan tahun 2013, sehingga di tahun 2018 tingkat kemiskinan turun signifikan menjadi 27,74%. Dan terakhir IPM dapat meningkat 1,31% per tahun yang lebih tinggi dibandingkan beberapa provinsi lainnya di Indonesia, sehingga IPM Papua mencapai 60,06 poin pada tahun 2018. Serangkaian angka indikator makro sosial ekonomi ini dapat membantu kita memahami bahwa pembangunan dan hasilnya di provinsi Papua selama periode 2013–2018 sudah berada pada alur yang benar (*on the right track*).

Namun demikian, pengungkapan fakta berdasarkan data statistik semata belum kuat sebagai bukti untuk menyatakan bahwa hasil pembangunan sudah dapat dirasakan oleh Orang Asli Papua selang dua tahun masa pembangunan ini. Perlu dilakukan suatu evaluasi kebijakan penggunaan Dana Otsus. Di mana evaluasi ini merupakan rangkuman hasil pengukuran capaian kinerja selama tahun berjalan, yang berkontribusi terhadap capaian *outcome* yang telah ditetapkan sebelumnya. Capaian kinerja *output* dan *outcome* diukur dengan menggunakan berbagai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Sehubungan dengan kepentingan tersebut maka kegiatan evaluasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Dana Prospek di provinsi Papua perlu dilakukan.

Keberhasilan suatu program/kegiatan tidak dapat terlepas dari pelaksanaannya. Oleh karena itu, *monitoring* dan evaluasi terhadap suatu program/kegiatan akan menyangkut berbagai hal yang terkait,

baik itu dari segi kualitas *input*, proses, *output*, *outcome*, hingga pada *impact*. Secara umum sistem *monitoring* dan evaluasi yang dilaksanakan menggunakan pendekatan manajemen pencapaian hasil (*results-based management*). Hal tersebut sejalan dengan agenda pembangunan untuk mengupayakan penggunaan Dana Otsus selama ini agar menjadi lebih efektif (*effectiveness agenda*), harmonis dan ber-sinergi baik itu antarbidang maupun antarsektor.

1.2. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Evaluasi

Maksud dari pelaksanaan evaluasi Prospek adalah dapat tersedianya dokumen evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan Prospek Papua tahun 2019. Sedangkan tujuannya sebagai berikut:

1. Merumuskan dan mengidentifikasi indikator-indikator pengendalian dan evaluasi, serta pedoman dalam pengelolaan Dana Prospek;
2. Memberikan informasi tentang hambatan, dukungan dan metode pemecahan masalah yang tepat untuk melaksanakan program Prospek Papua;
3. Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program, dan media untuk menentukan arah program dan pendekatan yang tepat dalam mencapai sasaran program dengan baik;
4. Memberikan rekomendasi kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan dana Otsus Prospek di masa mendatang untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang.

1.3. Sasaran Pelaksanaan Evaluasi

Sasaran yang dicapai dalam kegiatan evaluasi pelaksanaan Prospek ini adalah:

1. Terumuskannya penilaian keberhasilan kebijakan program Dana Otsus Prospek, umpan balik bagi sistem penilaian program, dan pendekatan yang tepat untuk mencapai sasaran program;
2. Teridentifikasinya permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan Dana Prospek jika dikaitkan dengan kualitas kinerja outcome;
3. Terumuskannya indikator-indikator evaluasi dan panduan evaluasi penggunaan Dana Otsus Prospek yang dapat mengakomodir seluruh persepsi dari pemerintah daerah kabupaten/kota dan masyarakat Asli Papua;
4. Teridentifikasi dan terkumpulnya berbagai data dan informasi yang terkait dengan pengelolaan Dana Otsus Prospek mulai dari tingkat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai pengelola anggaran sampai dengan masyarakat Asli Papua sebagai penerima manfaat;
5. Tersusunnya rekomendasi kebijakan yang terkait dengan perbaikan pengelolaan Dana Otsus Prospek untuk masa mendatang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang.

1.4. Landasan Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan evaluasi pelaksanaan Prospek ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua 2005–2025;
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua 2013–2018;
8. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 25), yang selanjutnya mengalami perubahan dua kali melalui Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 13

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus;

1.5. Sistematika Penulisan

Dokumen laporan *Evaluasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Prospek Papua - Tahun Anggaran 2019* ini disusun secara sistematis dan terstruktur dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

- BAB I PENDAHULUAN**, yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, landasan hukum dan sistematika penulisan.
- BAB II METODE EVALUASI**, menjelaskan cara dan teknik evaluasi dilakukan yang mencakup prinsip-prinsip dasar *monitoring* dan evaluasi, pendekatan *monitoring* dan evaluasi, ruang lingkup monitoring dan evaluasi, teknik pengumpulan data, dan metode analisis.
- BAB III PROFIL MAKRO SOSIAL EKONOMI DAN DANA PROSPEK PAPUA**, yang menggambarkan tentang perkembangan indikator-indikator sosial ekonomi makro provinsi Papua, dan pengelolaan dana Prospek Papua selama periode 2014–2018.
- BAB IV HASIL EVALUASI PELAKSANAAN DANA PROSPEK PAPUA**, merupakan bab yang menunjukkan dan menjelaskan hasil evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan Dana Prospek, yang dijabarkan dan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif selama periode 2014–2018 untuk 5 wilayah

adat pembangunan yaitu Wilayah Adat Anim Ha, Lapago, Mepago, Saereri dan Mamta.

BAB V ISU-ISU STRATEGIS DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN, yang memuat isu-isu strategis dari hasil evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan Dana Prospek, serta rekomendasi kebijakan yang strategis mengenai keberlanjutan Dana Prospek Papua di masa mendatang.

BAB VI PENUTUP, merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

Metode Evaluasi

2.1. Prinsip-Prinsip Dasar Evaluasi

Prinsip dasar yang digunakan dalam kegiatan evaluasi kebijakan penggunaan Dana Otsus ini adalah merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki pengelolaan Dana Otsus, khususnya Dana Prospek Papua di masa mendatang dalam upaya meningkatkan pelayanan dari pemerintah daerah terhadap Orang Asli Papua terutama di bidang kelembagaan kampung dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, berdasarkan prinsip-prinsip partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan pemberdayaan.

2.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pelaksanaan evaluasi ini di antaranya adalah: (1) Lingkup Wilayah, yang mencakup 29 kabupaten/kota di provinsi Papua; (2) Lingkup Objek, yang meliputi indikator-indikator makro dan mikro sosial ekonomi berupa *outcome* dari hasil pelaksanaan program; dan (3) Lingkup Kegiatan, yang terdiri atas kegiatan persiapan, pelaksanaan, verifikasi, dan diseminasi.

2.3. Manajemen Data

Manajemen data yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi ini meliputi jenis data dan metoda pengumpulan data. Menurut jenisnya, data yang diliput dalam evaluasi ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika koisioner disebarakan melalui internet (Uma Sekaran, 2011). Sedangkan data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya (Uma Sekaran, 2011). Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono, 2008). Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan kredit pada suatu bank.

Metoda pengumpulan data yang digunakan dalam evaluasi ini terdiri atas 4 cara meliputi: wawancara mendalam, survei, FGD dan

tinjauan dokumen. Secara singkat keempat metode tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Wawancara-mendalam (*In-depth Interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Sutopo 2006)

Survei adalah penyelidikan yang dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta dari gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual baik tentang institusi sosial, ekonomi atau politik dari suatu kelompok atau suatu individu (Nazir, 2005)

Focus Group Discussion atau FGD adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Atau sederhananya FGD dapat didefinisikan sebagai suatu diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah mengenai suatu isu atau masalah tertentu (Irwanto, 2006).

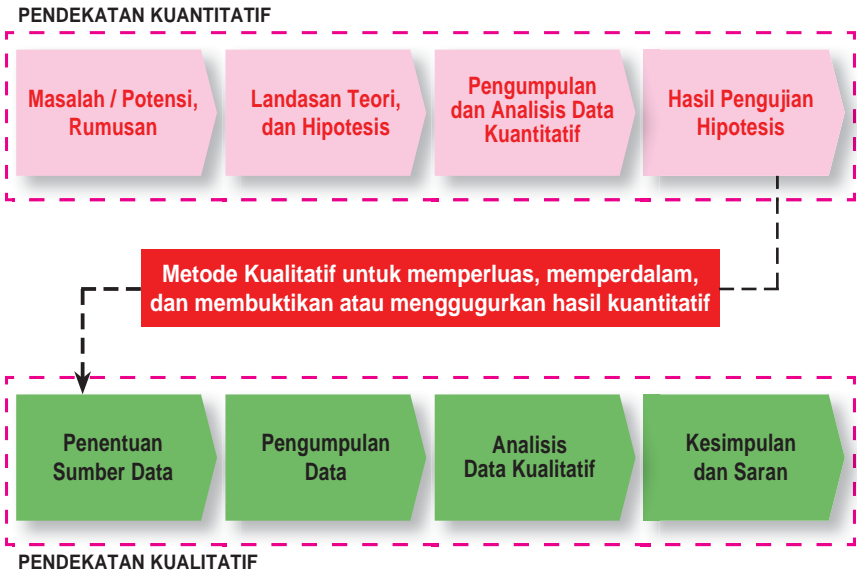
Tinjauan dokumen (*document review*) merupakan cara mengumpulkan data dengan melakukan pemeriksaan kembali dokumen yang ada. Dalam hal ini, peninjauan dokumen dilakukan pada dokumen-dokumen yang bersifat internal dan eksternal terhadap suatu program atau organisasi.

2.4. Pendekatan Evaluasi

Pendekatan yang digunakan dalam evaluasi kebijakan ini adalah Kuantitatif (Kuantitatif dan Kualitatif) atau *Mix Method* yaitu suatu metodologi yang memberikan asumsi filosofis dalam menunjukkan

arah atau memberi petunjuk cara pengumpulan data dan menganalisis data serta perpaduan pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui beberapa fase proses penelitian. Pada umumnya penelitian sosial menggunakan kombinasi analisis logika yang dikonstruksikan (kuantitatif) dan logika dalam praktek (kualitatif), walaupun proporsi dari masing-masing tipe logika tersebut bervariasi. Oleh karena itu pendekatan kualitatif dan kuantitatif (Kuantitatif) yang dilakukan secara bersamaan mempunyai tujuan untuk saling melengkapi gambaran hasil *monitoring* dan evaluasi mengenai fenomena yang diteliti dan untuk memperkuat analisis penelitian.

Gambar 2.1.
Desain Model *Sequential Explanatory*



Adapun metode kuantitatif yang digunakan adalah *Sequential Explanatory Design* yaitu suatu pendekatan yang mendahulukan pendekatan kuantitatif untuk memfasilitasi penelitian kualitatif. Model ini

digunakan karena ingin dibandingkan dan dibedakan secara langsung terhadap hasil analisis statistik deskriptif kuantitatif dengan temuan kualitatif atau untuk memvalidasi dan mengekspansi hasil kuantitatif dengan data kualitatif (Lihat Gambar 2.1.).

2.5. Proses Pelaksanaan Evaluasi

Proses pelaksanaan evaluasi kali ini diawali dengan menentukan tujuan dari evaluasi tersebut dilakukan. Selanjutnya menyusun pedoman evaluasi yang terdiri atas desain evaluasi yang kredibel, rencana evaluasi dan *stakeholder* evaluasi. Berdasarkan pedoman tersebut kemudian dilaksanakan evaluasi lapangan, di mana hasilnya didiseminasikan dahulu sebelum digunakan. Secara singkat seluruh proses ini dapat dijelaskan pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1.
Perencanaan Evaluasi

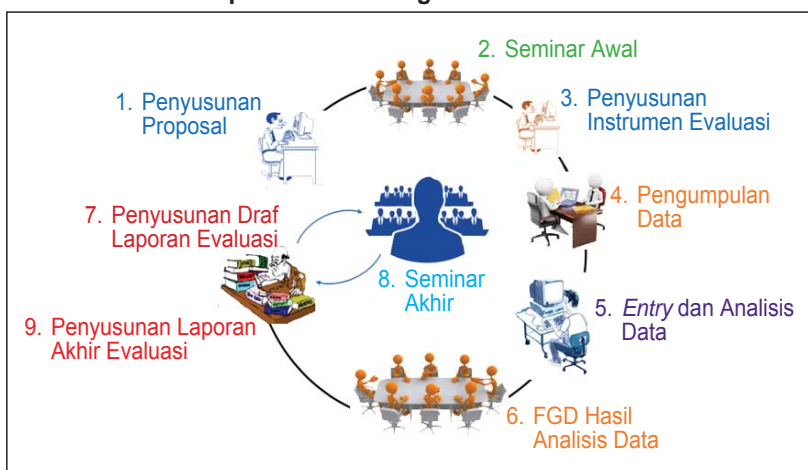
Proses Evaluasi	Konsep Proses Evaluasi	Rancangan Proses Evaluasi
Menentukan Tujuan Evaluasi	Untuk apa evaluasi dilakukan, apakah untuk mengetahui dampak kebijakan atau Prioritas Pembangunan? Ataukah untuk mengetahui capaian pelaksanaan suatu program pembangunan.	(1) Untuk merumuskan dan mengidentifikasi indikator-indikator pengendalian dan evaluasi, serta pedoman dalam pengelolaan Dana Otsus Prospek; (2) untuk memberikan informasi tentang hambatan, dukungan dan metode pemecahan masalah yang tepat untuk melaksanakan program Prospek; (3) Untuk memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program, dan media untuk menentukan arah program dan pendekatan yang tepat dalam mencapai sasaran program dengan baik; (4) Untuk

		memberikan rekomendasi kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan dana Prospek di masa mendatang untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang.
Menyusun Desain Evaluasi Yang Kredibel	Apakah melalui suatu cara pengumpulan data yang makro atau mikro, telaah dokumen yang ada, ataukah membangkitkan parameter dan variabel yang terkait saja.	(1) Menggunakan data makro dan data mikro, (2) penetapan indikator-indikator evaluasi, (3) komparasi antar variabel dan antar waktu.
Mendiskusikan Rencana Evaluasi	Perlu disepakati tahapan pelaksanaan evaluasi, sehubungan dengan <i>time frame</i> yang tersedia, tahap yang harus dilalui, metode yang digunakan, sumber data, pembiayaan, tenaga ahli dan desiminasi.	(1) Waktu pelaksanaan 4 bulan, (2) Melalui empat tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap verifikasi, dan tahap diseminasi, (3) Metode yang digunakan survei institusional.
Menentukan <i>Stakeholder</i> Evaluasi	Memastikan siapa saja yang terlibat dan bertanggungjawab atas masing-masing tahapan pelaksanaan evaluasi.	(1) Pelaksana evaluasi adalah Bappeda Provinsi Papua, (2) Informan/responden adalah sebagian OPD pengelola dana Prospek, serta sebagian penerima manfaat program tersebut.
Melaksanakan Evaluasi	Pelaksanaan evaluasi dilakukan dalam waktu tertentu, dengan kontrol yang <i>rigid</i> . Analisis hasil didiskusikan dan dikritisi sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.	Proses pelaksanaan evaluasi dimulai dengan menyusun instrumen evaluasi dalam bentuk matriks realisasi pencapaian target, kemudian dilanjutkan dengan menyebar instrumen. Setelah terkumpul seluruh instrumen, kemudian diolah dan dianalisis. Hasilnya disusun dalam suatu dokumen laporan evaluasi.
Mendiseminasikan Hasil Evaluasi	Diketahui dan disepakati hasil evaluasi akan digunakan untuk siapa dan untuk apa.	Hasil evaluasi akan digunakan sebagai (1) alat pemetaan masalah dan kendala proses pelaksanaan program Prospek,

		(2) bahan rujukan dalam memecahkan permasalahan-permasalahan pelaksanaan Program Prospek, (3) acuan dalam melaksanakan koordinasi lintas OPD dan lintas pelaku untuk percepatan pencapaian target program/ kegiatan, dan (4) dokumen panduan evaluasi pelaksanaan program secara periodik.
Menggunakan Hasil Evaluasi	hasil evaluasi dapat segera dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dan kepentingan, seperti misalnya perencanaan tahun berikutnya, atau alokasi dana untuk tahun anggaran berikutnya.	(1) umpan balik terhadap program/, (2) bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan program, (3) pedoman dalam penyusunan program di masa mendatang.

Sumber: data diolah (2019)

Gambar 2.2.
Tahapan Dan Rancangan Jadwal Evaluasi



Sumber: data diolah (2019)

Secara teknis operasional, pelaksanaan evaluasi Prospek Papua ini mengikuti beberapa tahapan sebagaimana Gambar 2.2.

2.6. Teknik Sampling Evaluasi Prospek

Pengambilan sampel wilayah pengamatan menggunakan *three stage sampling*, yaitu *pertama* seluruh wilayah adat dijadikan sampel; *kedua*, dari setiap wilayah adat diambil sampel kabupaten menggunakan metode *purposive sampling*; dan *ketiga*, dari setiap kabupaten sampel diambil sampel kampung juga menggunakan metode *purposive sampling*.

Adapun jumlah responden ditetapkan berdasarkan tiga karakteristik yaitu: (1) pengelola dana program; (2) penerima manfaat program; dan (3) pendukung program. Jumlah sampel responden dari masing-masing karakteristik ditetapkan secara *nonrandom*, dengan *sample fraction* yang dapat mewakili setidaknya 5–10%. Pengambilan responden dilakukan secara aksidental dan *snowball*.

Tabel 2.2.
Lokasi Pengambilan Sampel

Wilayah Adat	Kabupaten	Kampung Lokus
Anim Ha	Merauke	Wasur
		Sota
	Boven Digoel	Autriop
		Tanah Merah
La Pago	Jayawijaya	Wamena Kota
		Hituma
	Tolikara	Mamit
		Ebenezer
	Yalimo	Bulmu
		Abenaho

Mee Pago	Nabire	Oyehe
		Kali Bobo
	Paniai	Madi
		Enarotali
	Dogiyai	Mauwa
		Bomomani
	Deiyai	Bomou 1
		Damabagata
Mamta	Kota Jayapura	Skouw
		Holtekamp
		Tobati
		Enggros
		Yoka
	Jayapura	Nolokla
		Asei Besar
		Asei Kecil
		Ifale
		Dobonsolo
	Sarmi	Beneraf
		Nengke
	Keerom	Kalimo (Bompai)
		Pund
Sairei	Biak Fumor	Kelurahan Waupnor
		Soryar
	Supiori	Sorendiwari
		Wafor
		Yamnaisu / Pulai Rani

Sumber: data diolah (2019)

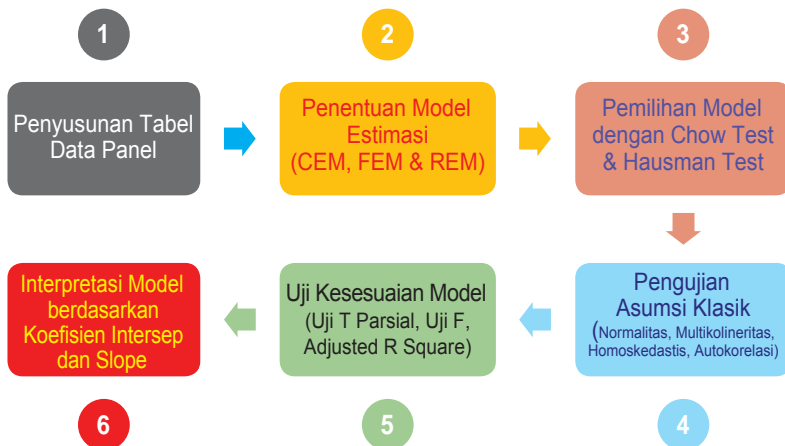
2.7. Metoda Analisa

Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya bahwa pendekatan evaluasi yang digunakan adalah *mix method* yang merupakan kombinasi antara pendekatan kuantitatif dengan kualitatif. Keduanya tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

2.7.1. Model Data Panel

Untuk pendekatan kuantitatif metoda analisa yang digunakan adalah Model Data Panel. Model data panel memungkinkan kita untuk membangun dan menguji model perilaku yang lebih rumit daripada data *cross-section* atau *time series* biasa. Selain itu Data panel lebih mampu mengidentifikasi dan mengukur efek yang tidak terdeteksi dalam model *cross-section* atau *time series*. Terakhir data panel memberikan data yang lebih informatif, variabilitas yang lebih, kurang kolinearitas antarvariabel, derajat kebebasan yang lebih dan efisiensi yang lebih tinggi. Dengan data tambahan yang lebih informatif, seseorang dapat menghasilkan estimasi parameter yang lebih handal; (2) Deskriptif Kuantitatif. Menggunakan skoring untuk rasio pencapaian, ukuran-ukuran pemusatan, distribusi frekuensi, *crosstab analysis*.

Gambar 2.3.
Analisis Model Data Panel



Sumber: data diolah (2019)

Model Data Panel yang akan diuji adalah sebagai berikut.

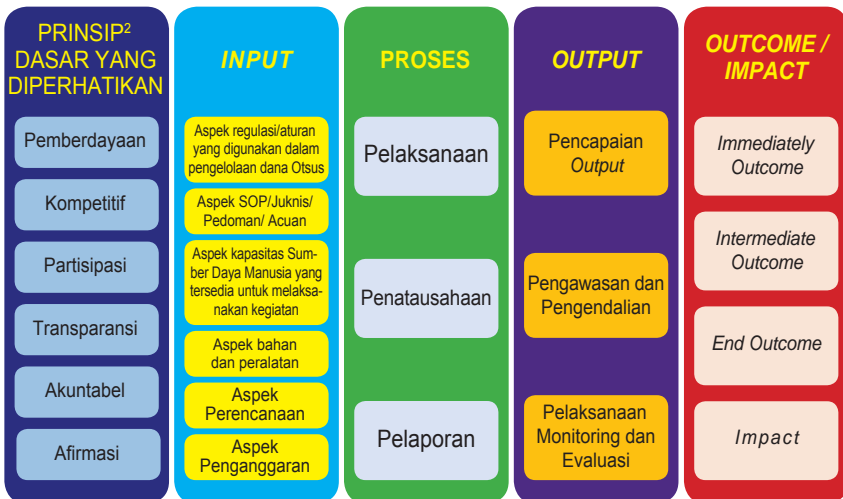
$$Y_{it} = \alpha + \sum_{k=2}^K \beta_k X_{kit} + \varepsilon_{it}$$

yang mana $i = 1, \dots, N$; $t = 1, \dots, T$; dan $k = 1, \dots, K$

Dengan N adalah banyaknya pengamatan objek; T adalah banyaknya waktu pengamatan; $N \times T$ adalah banyaknya data panel; Y_{it} adalah nilai peubah respons untuk objek ke- i dan waktu ke- t ; α adalah koefisien intersep yang merupakan skalar yang akan menjadi kontrol model panel data yang dibentuk berdasarkan beberapa asumsi; X_{itk} adalah pengamatan terhadap k peubah bebas untuk objek ke- i dan waktu ke- t ; β adalah koefisien regresi; ε adalah komponen galat pada model regresi data panel.

2.7.2. Deskriptif Kuantitatif

Gambar 2.4.
Aspek-Aspek Evaluasi Program Prospek Papua Tahun 2014–2018



Dalam analisis kuantitatif ini, selain digunakan model Data Panel, juga digunakan analisis statistik deskriptif, yang diterapkan untuk menganalisis hasil survei lapangan. Di mana survei lapangan dilakukan dengan menyebar seperangkat instrumen kuesioner tertutup kepada responden terpilih di beberapa sampel wilayah kabupaten yang diamati. Adapun pedoman untuk membangun instrumen evaluasi yang digunakan adalah sebagaimana tercantum pada Gambar 2.4.

Mengacu kepada aspek-aspek yang menjadi fokus evaluasi di atas, selanjutnya disusun kisi-kisi instrumen evaluasi yang menjadi dasar dari penyusunan kuesioner (lihat lampiran), adalah seperti yang tercantum di dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Kisi-Kisi Instrumen Evaluasi Prospek Papua

Variabel	Deskriptor	Skala
Profil Kegiatan Pengelolaan Dana	Pembangunan infrastruktur dasar kampung	Rasio
	Peningkatan kapasitas SDM melalui pemenuhan makanan dan gizi pendidikan & kesehatan	Rasio
	Penyediaan sarana/prasarana sosial ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat	Rasio
	Perluasan kesempatan berwirausaha	Rasio
	Peluang pengembangan usaha bagi masyarakat	Rasio
	Sarana prasarana, pendidikan dan kesehatan	Rasio
Dukungan Regulasi dan SOP/Juknis/Juklak Program	Regulasi yang digunakan/dirujuk/diacu	Ordinal
	SOP/Juklak/Juknis yang digunakan/dirujuk/diacu	Ordinal
	Sosialisasi Regulasi dan SOP/Juknis/Juklak program/kegiatan	Ordinal
	Tingkatan sosialisasi Regulasi dan SOP/Juknis/Juklak program/kegiatan	Ordinal
	Lingkup wilayah sosialisasi Regulasi dan SOP/Juknis/Juklak program/kegiatan	Ordinal
Sumber Daya Manusia Pelaksana Program	Kuantitas SDM	Ordinal
	Kapasitas SDM	Ordinal
	Partisipasi masyarakat OAP	Ordinal

	Ketersediaan tenaga pendamping	Ordinal
Perencanaan Program/Kegiatan	Termuatnya program/kegiatan dalam dokumen-dokumen perencanaan teknis	Ordinal
	Ketepatan lokasi program/kegiatan	Ordinal
	Ketepatan sasaran program/kegiatan	Ordinal
	Keterlibatan masyarakat OAP	Ordinal
	Rata-rata tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan teknis	Ordinal
	Pembahasan program/kegiatan	Ordinal
	Ketersediaan rumusan dan penggunaan indikator-indikator	Ordinal
Penggangan Program/Kegiatan	Termuatnya program/kegiatan dokumen-dokumen penganggaran teknis	Ordinal
	Rutinitas pengembangan program/kegiatan dalam dokumen penganggaran	Ordinal
	Rata-rata tingkat konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran	Ordinal
	Rata-rata tingkat harmonisasi penganggaran program/kegiatan	Ordinal
	Pemenuhan kebutuhan anggaran untuk setiap pelaksanaan program/kegiatan	Ordinal
Pelaksanaan & Pentausahaan Program/Kegiatan	Publikasi sumber dana program/kegiatan dalam pengadaan barang dan jasa	Ordinal
	Ketepatan waktu pencairan dana program/kegiatan	Ordinal
	Kepatuhan dalam mengikuti skema pencairan dana program/kegiatan	Ordinal
	Terjadinya SILPA dana pelaksanaan program/kegiatan	Ordinal
	Penggunaan SILPA dana dari pelaksanaan program/kegiatan	Ordinal
Pelaporan Program/Kegiatan	Ketersediaan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan	Ordinal
	Rutinitas Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan	Ordinal
Pengawasan Program/Kegiatan	Bentuk pelaksanaan pengawasan internal program/kegiatan	Ordinal
	Rutinitas pelaksanaan pengawasan internal program/kegiatan	Ordinal

	Tersedianya wadah aduan dari masyarakat OAP	Ordinal
	Partisipasi masyarakat OAP dalam pengawasan program	Ordinal
Monitoring dan Pengendalian	Adanya monitoring dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan	Ordinal
	Pelaksana monitoring dan pengendalian program/kegiatan	Ordinal
	Bentuk pelaksanaan monitoring dan pengendalian program/kegiatan	Ordinal
	Tindak lanjut dari hasil monitoring dan pengendalian program/kegiatan	Ordinal
	Publikasi hasil monitoring dan pengendalian program/kegiatan	Ordinal
	Keterlibatan masyarakat OAP dalam melakukan monitoring dan pengendalian program/kegiatan	Ordinal

Hasil dari penyebaran instrumen evaluasi di atas selanjutnya di tabulasi baik itu secara tunggal maupun *crostab*, yang kemudian dianalisis menggunakan alat-alat statistik deskriptif antara lain distribusi frekuensi absolut dan relatif, ukuran-ukuran pemusatan, serta analisis *crostab*.

2.7.3. Deskriptif Kualitatif

Kemudian Untuk pendekatan kualitatif metoda analisa yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antaraspek yang timbul, perbedaan antarfakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya. Adapun model analisis kua-

litatif yang digunakan dalam evaluasi ini mengadopsi dari Miles dan Huberman (1992) sebagaimana terlihat pada Gambar 2.5.

Gambar 2.5.
Model Miles Dan Huberman



Sumber: data diolah (2019)

Profil Makro Sosial Ekonomi Dan Dana Prospek Papua

3.1. Kualitas Pembangunan Manusia

Konsep pembangunan manusia telah diperkenalkan sejak tahun 1990 oleh UNDP (*United Nation Development Programme*) dalam *Global Human Development Report*. Pembangunan manusia merupakan proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a Process of enlarging the choices*) dengan tujuan utama menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif yang pencapaiannya sangat tergantung pada empat hal pokok yaitu produktifitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), kesinambungan (*sustainability*) dan pemberdayaan (*empowerment*). Indikator yang digunakan untuk

mengukur sejauhmana keberhasilan kualitas pembangunan manusia yaitu IPM. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, Pendidikan dan sebagainya. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga komponen dasar yaitu umur Panjang dan hidup sehat (*a long and healty life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup yang layak (*decent standard of living*).

Komponen pertama pembentuk IPM adalah Angka Harapan Hidup yang mempresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Hidup lebih lama merupakan dambaan setiap orang, namun untuk dapat berumur Panjang tentunya diperlukan kesehatan yang baik. Pembangunan manusia memperluas pilihan-pilihan manusia dengan mensyaratkan berumur panjang. Proksi umur panjang dan sehat yang digunakan dalam pembangunan manusia adalah indikator angka harapan hidup saat lahir (e_0). Indikator ini menjadi salah satu indikator gambaran kesehatan masyarakat. Angka harapan hidup saat lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Tabel 3.1.
Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua
Tahun 2013–2018
(dalam tahun)

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata ²
Merauke	66,5	66,5	66,5	66,5	66,6	66,7	66,5
Jayawijaya	57,7	57,8	58,3	58,5	58,7	59,0	58,3
Jayapura	66,0	66,0	66,3	66,4	66,5	66,7	66,3
Nabire	67,2	67,2	67,4	67,5	67,6	67,7	67,4

Kepulauan Yapen	68,6	68,6	68,7	68,7	68,7	68,9	68,7
Biak Numfor	67,8	67,9	67,9	67,9	67,9	68,0	67,9
Paniai	65,1	65,2	65,5	65,6	65,7	65,9	65,5
Puncak Jaya	63,7	63,8	64,2	64,3	64,4	64,7	64,2
Mimika	71,9	71,9	71,9	71,9	71,9	72,1	71,9
Boven Digoel	57,6	57,6	58,2	58,5	58,8	59,2	58,3
Mappi	63,5	63,5	64,0	64,2	64,3	64,6	64,0
Asmat	54,9	55,0	55,5	55,9	56,3	56,9	55,8
Yahukimo	64,5	64,6	65,1	65,2	65,3	65,5	65,0
Pegunungan Bintang	63,6	63,6	63,8	63,8	63,9	64,1	63,8
Tolikara	64,6	64,7	64,9	65,0	65,1	65,3	64,9
Sarmi	65,5	65,5	65,7	65,8	65,8	66,0	65,7
Keerom	66,0	66,0	66,1	66,1	66,2	66,4	66,1
Waropen	65,7	65,7	65,7	65,8	65,8	66,0	65,8
Supiori	65,2	65,2	65,3	65,3	65,3	65,5	65,3
Mamberamo Raya	56,4	56,4	56,6	56,7	56,9	57,2	56,7
Nduga	53,5	53,6	53,6	54,5	54,6	54,8	54,1
Lanny Jaya	64,8	64,9	64,9	65,6	65,7	65,8	65,3
Mamberamo Tengah	62,6	62,6	62,7	62,8	62,9	63,1	62,8
Yalimo	64,8	64,9	64,9	64,9	64,9	65,1	64,9
Puncak	65,0	65,0	65,1	65,1	65,1	65,3	65,1
Dogiyai	64,3	64,4	64,9	65,0	65,1	65,3	64,8
Intan Jaya	64,9	64,9	65,0	65,0	65,1	65,3	65,0
Deiyai	64,3	64,3	64,5	64,6	64,6	64,8	64,5
Kota Jayapura	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,2	70,0
Provinsi Papua	64,8	64,8	65,1	65,1	65,1	65,4	65,1

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

Perkembangan angka harapan hidup (AHH) provinsi Papua terlihat cenderung meningkat sepanjang tahun 2013–2018 dengan rata-rata mencapai 65,1 tahun atau dengan laju pertumbuhan rata-rata mencapai 0,18% per tahun. Tahun 2013–2014, IPM provinsi

Papua terlihat tidak mengalami perubahan yaitu tercatat sebesar 64,8 tahun, kemudian di tahun 2014, bertambah 0,3 tahun hingga menjadi 65,1 tahun, yang mana angka ini bertahan hingga tahun 2017, selanjutnya di tahun 2018 AHH bertambah 0,3 tahun sehingga menjadi 65,4 tahun.

Jika diperhatikan persebaran AHH menurut kabupaten/kota provinsi Papua, maka kabupaten Mimika, kota Jayapura dan kabupaten Yapen menempati posisi tertinggi yaitu masing-masing dengan rata-rata sebesar 71,9 tahun, 70,0 tahun, dan 68,7 tahun. Sedangkan AHH dengan posisi tiga terendah di provinsi Papua ditempati oleh kabupaten Nduga, Asmat dan Mamberamo Raya yaitu masing-masing sebesar 54,1 tahun, 55,8 tahun dan 56,7 tahun. Namun demikian, walaupun kabupaten Nduga, Asmat dan Mamberamo Raya memiliki AHH terendah tetapi jika diperhatikan, ternyata perkembangan AHH sepanjang tahun 2013–2018 konsisten mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan di atas rata-rata provinsi Papua yaitu masing-masing sebesar 0,48%, 0,77% dan 0,29%.

Komponen kedua pembentuk IPM adalah pengetahuan yang dibentuk oleh dua indikator yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Namun dalam analisis makro social kali ini hanya digunakan Rata-Rata Lama Sekolah sebagai indikator yang merepresantasikan pengetahuan.

Lamanya Sekolah atau *years of schooling* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Pada prinsipnya angka ini merupakan transformasi dari bentuk kategori TPT menjadi bentuk numerik. Angka Rata-Rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah

dijalani. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah.

Selama periode 2013–2018, penduduk provinsi Papua yang berusia di atas 25 tahun, memiliki rata-rata lama sekolah (RLS) yang terlihat telah bertambah sebesar 0,8 tahun yaitu dari 5,7 tahun pada tahun 2013 menjadi 6,5 tahun di tahun 2018 atau rata-rata sebesar 6,1 tahun yaitu telah tamat SD dengan laju pertumbuhan sebesar 2,66% per tahun. Jika diperhatikan persebaran RLS per kabupaten/kota di Papua, maka terlihat bahwa kota Jayapura menduduki peringkat pertama dalam capaian sampai dengan tahun 2018 RLS sebesar 11,3 tahun atau setingkat kelas 3 SMA dan mengalami peningkatan hingga 0,73% setiap tahunnya. Adapun titik terendah dalam pencapaian RLS adalah kabupaten Nduga yang hanya mampu mencapai RLS sebesar 0,9 tahun atau setingkat kelas 1 SD, dan rata-rata pertumbuhan terhadap peningkatan setiap tahunnya sebesar 9,05%.

Tabel 3.2.
Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua
Tahun 2013–2018
(dalam tahun)

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata ²
Merauke	8,0	8,2	8,2	8,3	8,3	8,5	8,3
Jayawijaya	4,4	4,4	4,6	4,7	5,0	5,2	4,7
Jayapura	9,3	9,4	9,5	9,5	9,5	9,6	9,5
Nabire	8,9	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,4
Kepulauan Yapen	8,4	8,7	8,8	8,8	8,8	9,1	8,8
Biak Numfor	9,0	9,6	9,8	9,8	9,9	10,0	9,7

Paniai	3,7	3,7	3,8	3,8	3,9	4,2	3,9
Puncak Jaya	2,9	3,0	3,2	3,4	3,5	3,5	3,3
Mimika	8,8	9,3	9,4	9,5	9,5	9,8	9,4
Boven Digoel	7,5	7,5	7,7	7,8	8,1	8,3	7,8
Mappi	5,9	6,0	6,0	6,0	6,1	6,3	6,1
Asmat	4,3	4,3	4,4	4,5	4,7	4,7	4,5
Yahukimo	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Pegunungan Bintang	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,5	2,2
Tolikara	3,0	3,0	3,1	3,2	3,5	3,6	3,2
Sarmi	7,3	7,9	8,1	8,1	8,3	8,5	8,0
Keerom	6,5	6,6	6,9	7,2	7,6	7,8	7,1
Waropen	8,5	8,5	8,6	8,7	8,7	8,9	8,7
Supiori	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,4	8,2
Mamberamo Raya	4,4	4,4	4,6	4,9	5,2	5,5	4,8
Nduga	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,9	0,7
Lanny Jaya	2,6	2,6	2,8	2,9	3,2	3,2	2,9
Mamberamo Tengah	2,2	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,5
Yalimo	1,8	2,1	2,1	2,2	2,3	2,4	2,2
Puncak	1,4	1,4	1,6	1,8	1,9	2,0	1,7
Dogiyai	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
Intan Jaya	2,2	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4
Deiyai	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Kota Jayapura	10,9	11,1	11,1	11,1	11,2	11,3	11,1
Provinsi Papua	5,7	5,8	6,0	6,2	6,3	6,5	6,1

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

Adapun secara keseluruhan terdapat 16 kabupaten dengan angka RLS di bawah 5 tahun atau setingkat di bawah kelas 5 SD yaitu kabupaten Jayawijaya, Paniai, Puncak Jaya, Asmat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, Mambramo Raya, Nduga, Lanny Jaya, Mambramo Tengah, Yalimo, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya dan Deiyai.

Komponen terakhir pembentuk IPM adalah standar hidup yang layak dipresentasikan oleh pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita provinsi Penduduk di Papua terlihat konsisten meningkat sepanjang periode 2013–2018. Tahun 2013, pengeluaran per kapita penduduk Papua mencapai Rp 6,394 juta dan pada tahun 2018 mencapai Rp 7,159 juta atau bertambah Rp 765 ribu dengan rata-rata meningkat sebesar 2,30% per tahun.

Tabel 3.3.
Pengeluaran Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua
Tahun 2013–2018
(dalam ribu rupiah)

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata ²
Merauke	9.841	9.882	9.953	10.016	10.277	10.430	10.067
Jayawijaya	6.875	6.989	7.068	7.282	7.524	7.637	7.229
Jayapura	9.586	9.597	9.622	9.653	10.055	10.160	9.779
Nabire	8.615	8.652	8.725	8.779	8.983	9.143	8.816
Kepulauan Yapen	7.199	7.241	7.320	7.414	7.605	7.739	7.420
Biak Numfor	9.520	9.553	9.603	9.647	9.812	9.969	9.684
Paniai	6.026	6.086	6.161	6.191	6.355	6.535	6.226
Puncak Jaya	4.908	4.938	4.979	5.089	5.341	5.459	5.119
Mimika	10.849	10.873	10.952	11.169	11.591	11.700	11.189
Boven Digoel	7.625	7.646	7.717	7.770	8.048	8.211	7.836
Mappi	5.655	5.709	5.780	5.951	6.143	6.268	5.918
Asmat	5.427	5.485	5.533	5.601	5.771	5.882	5.617
Yahukimo	4.068	4.081	4.109	4.248	4.554	4.737	4.300
Pegunungan Bintang	5.052	5.095	5.176	5.289	5.506	5.578	5.283
Tolikara	4.412	4.468	4.518	4.711	4.827	4.946	4.647
Sarmi	6.342	6.358	6.379	6.417	6.723	6.814	6.506
Keerom	8.475	8.514	8.609	8.671	8.824	8.918	8.669
Waropen	5.979	5.989	6.070	6.270	6.810	6.978	6.349
Supiori	5.060	5.098	5.180	5.379	5.655	5.769	5.357

Mamberamo Raya	4.241	4.303	4.324	4.387	4.596	4.755	4.434
Nduga	3.542	3.607	3.625	3.725	3.972	4.131	3.767
Lanny Jaya	3.882	3.901	3.965	4.106	4.356	4.517	4.121
Mamberamo Tengah	3.964	3.985	4.051	4.219	4.510	4.609	4.223
Yalimo	4.247	4.298	4.321	4.435	4.702	4.799	4.467
Puncak	4.986	5.010	5.118	5.181	5.413	5.506	5.202
Dogiyai	4.992	5.061	5.120	5.190	5.375	5.522	5.210
Intan Jaya	4.961	4.995	5.015	5.038	5.293	5.440	5.124
Deiyai	4.281	4.293	4.320	4.383	4.597	4.761	4.439
Kota Jayapura	14.088	14.172	14.249	14.319	14.781	14.922	14.422
Provinsi Papua	6.394	6.416	6.469	6.637	6.996	7.159	6.679

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

Jika diperhatikan persebaran pengeluaran per kapita penduduk per kabupaten/kota di Papua, maka posisi tertinggi ditempati oleh kota Jayapura dengan rata-rata mencapai Rp 14,422 juta atau terus tumbuh sebesar 1,16% per tahun. Posisi ke dua dan ketiga ditempati oleh kabupaten Mimika yaitu sebesar Rp 11,189 juta dan kabupaten Merauke yang mencapai Rp 10,067 juta. Sementara itu, pengeluaran per kapita terendah sepanjang periode 2013–2018 terdapat di kabupaten Nduga yaitu tercatat sebesar Rp 3,542 juta di tahun 2013 kemudian konsisten meningkat menjadi Rp 4,131 juta atau bertambah sebesar Rp 589 ribu atau rata-rata terus tumbuh sebesar 3,15% per tahun. Kabupaten dengan pengeluaran per kapita yang menempati posisi terendah kedua dan ketiga sepanjang periode 2013–2018 yaitu kabupaten Lanny Jaya dengan rata-rata sebesar Rp 4,121 juta dan kabupaten Mamberamo Tengah dengan rata-rata Rp 4,223 juta per tahun. Sedangkan jika diperhatikan secara keseluruhan maka terdapat 19 kabupaten dengan pengeluaran per kapita sepanjang periode 2013–2018 berada di bawah rata-rata provinsi Papua yaitu kabupaten

Paniai, Puncak Jaya, Mappi, Asmat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, Sarmi, Waropen, Supiori, Mambramo Raya, Nduga, Lanny Jaya, Mambramo Tengah, Yalimo, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya dan Deiyai.

Capaian IPM di provinsi Papua terlihat mengalami peningkatan sepanjang periode 2013–2018. Tahun 2013, IPM provinsi Papua tercatat sebesar 56,25 poin kemudian meningkat menjadi 60,06 poin di tahun 2018 atau bertambah sebesar 3,81 poin dan telah bergeser dari status rendah ke status IPM sedang.

Tabel 3.4.
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2013–2018

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Merauke	66,88	67,33	67,75	68,09	68,64	69,38
Jayawijaya	52,94	53,37	54,18	54,96	55,99	56,82
Jayapura	69,21	69,55	70,04	70,50	70,97	71,25
Nabire	65,45	66,25	66,49	66,64	67,11	67,70
Kepulauan Yapen	64,34	64,89	65,28	65,55	66,07	67,00
Biak Numfor	69,35	70,32	70,85	71,13	71,56	71,96
Paniai	53,70	53,93	54,20	54,34	54,91	55,83
Puncak Jaya	43,36	44,32	44,87	45,49	46,57	47,39
Mimika	69,50	70,40	70,89	71,64	72,42	73,15
Boven Digoel	57,96	58,21	59,02	59,35	60,14	60,83
Mappi	55,51	55,74	56,11	56,54	57,10	57,72
Asmat	45,54	45,91	46,62	47,31	48,49	49,37
Yahukimo	45,63	46,36	46,63	47,13	47,95	48,51
Pegunungan Bintang	38,94	39,68	40,91	41,90	43,24	44,22
Tolikara	45,68	46,16	46,38	47,11	47,89	48,85
Sarmi	59,51	60,48	60,99	61,27	62,31	63,00
Keerom	62,49	62,73	63,43	64,10	64,99	65,75
Waropen	61,68	61,97	62,35	63,10	64,08	64,80

Supiori	59,40	59,70	60,09	60,59	61,23	61,84
Mamberamo Raya	47,28	47,88	48,29	49,00	50,25	51,24
Nduga	24,42	25,38	25,47	26,56	27,87	29,42
Lanny Jaya	43,05	43,28	44,18	45,16	46,49	47,34
Mamberamo Tengah	42,43	43,19	43,55	44,15	45,50	46,41
Yalimo	43,33	44,21	44,32	44,95	46,19	47,13
Puncak	37,73	38,05	39,41	39,96	41,06	41,81
Dogiyai	51,46	52,25	52,78	53,32	54,04	54,44
Intan Jaya	42,69	43,51	44,35	44,82	45,68	46,55
Deiyai	47,74	48,12	48,28	48,50	49,07	49,55
Kota Jayapura	77,46	77,86	78,05	78,56	79,23	79,58
Provinsi Papua	56,25	56,75	57,25	58,05	59,09	60,06

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

Jika dilihat persebarannya per kabupaten/kota di Papua, maka status capaian pembangunan manusia kabupaten/kota di Papua tahun 2018 terlihat bervariasi yang sebagian besar atau 16 kabupaten di Papua masuk kelompok capaian IPM rendah ($IPM < 60$). Adapun capaian IPM kabupaten/kota yang tergolong rendah yaitu kabupaten Jayawijaya, Paniai, Puncak Jaya, Mappi, Asmat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, Mamberamo Raya, Nduga, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya dan Deiyai. Selanjutnya kabupaten dengan status capaian IPM masuk kategori sedang ($60 \leq IPM \leq 70$) terdapat 8 kabupaten yaitu kabupaten Merauke, Nabire, Kepulauan Yapen, Boven Digoel, Sarmi, Keerom, Waropen dan Supiori. Sedangkan kabupaten/kota dengan status capaian IPM dikategorikan tinggi ($70 \leq IPM \leq 80$) yaitu kabupaten Jayapura, Biak Numfor, Mimika, dan Kota Jayapura. Khusus untuk kabupaten Jayapura, Biak Numfor dan Mimika terjadi pergeseran status dari sedang di tahun 2013 menjadi capaian IPM dengan status tinggi di tahun 2018.

Capaian IPM tertinggi kabupaten/kota di Papua ditempati oleh kota Jayapura yaitu dari 77,46 poin di tahun 2013 meningkat menjadi 79,58 poin di tahun 2018 atau bertambah sebesar 2,12 poin, sedangkan capaian IPM terendah berada di kabupaten Nduga yaitu dengan capaian IPM tahun 2013 sebesar 24,42 poin dan naik menjadi 29,42 poin di tahun 2018 atau bertambah sebesar 5 poin.

3.2. Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran

Persentase penduduk miskin provinsi Papua pada umumnya mengalami fluktuatif dan cenderung menurun. Rata-rata tingkat penduduk miskin di provinsi Papua selama enam tahun terakhir adalah sebesar 28,57%, di mana persentase penduduk miskin pada tahun 2013 sebanyak 31,52% dan pada tahun 2016 turun menjadi 28,54% atau naik sebesar 1,31% dibanding tahun 2015, kemudian di tahun 2017 tingkat kemiskinan terlihat menurun kembali hingga menjadi 27,62% selanjutnya di tahun 2018 meningkat kembali hingga menjadi 27,74% atau meningkat sebesar 0,43% dibanding tahun 2017. Rata-rata penurunan tingkat kemiskinan setiap tahunnya mencapai -2,39%.

Tabel 3.5.
Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua
Tahun 2013–2018
(dalam persen)

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata ²
Merauke	12,33	10,20	11,10	11,08	10,81	10,54	11,01
Jayawijaya	41,81	39,60	39,48	39,66	38,62	38,66	39,64
Jayapura	17,58	14,18	14,69	13,49	13,01	13,44	14,40
Nabire	27,69	23,92	24,37	26,03	25,38	25,17	25,43
Kepulauan Yapen	29,32	26,39	27,70	27,54	26,82	27,17	27,49

Biak Numfor	30,28	27,44	27,23	26,99	25,44	25,72	27,18
Paniai	40,15	36,07	37,43	39,13	37,40	37,35	37,92
Puncak Jaya	39,92	36,15	37,45	37,31	36,01	36,27	37,19
Mimika	20,37	16,11	16,20	14,72	14,89	14,55	16,14
Boven Digoel	23,70	18,87	19,50	20,82	19,90	20,35	20,52
Mappi	30,35	25,95	26,96	26,64	25,75	25,64	26,88
Asmat	33,84	29,10	28,48	27,79	27,16	27,41	28,96
Yahukimo	43,27	39,02	41,26	40,62	39,33	39,25	40,46
Pegunungan Bintang	37,23	32,78	31,55	31,52	30,60	30,75	32,41
Tolikara	38,00	33,27	34,00	33,63	32,73	33,14	34,13
Sarmi	17,72	13,32	13,85	13,74	13,75	14,51	14,48
Keerom	23,23	19,12	15,83	17,15	16,69	16,90	18,15
Waropen	37,27	32,63	31,41	31,25	30,82	30,53	32,32
Supiori	41,50	36,65	39,25	37,99	37,40	39,22	38,67
Mamberamo Raya	34,25	29,86	29,71	29,52	29,88	30,10	30,55
Nduga	39,69	35,89	35,89	38,47	37,29	38,13	37,56
Lanny Jaya	43,79	39,26	41,97	41,68	39,60	40,06	41,06
Mamberamo Tengah	39,59	35,47	35,54	38,36	36,38	37,02	37,06
Yalimo	40,33	35,65	35,88	35,80	34,97	35,45	36,35
Puncak	41,96	37,85	38,74	38,58	37,46	38,15	38,79
Dogiyai	32,25	29,10	29,10	31,21	30,36	30,48	30,42
Intan Jaya	42,03	38,16	41,34	43,73	42,23	42,71	41,70
Deiyai	47,52	44,49	45,74	45,11	43,63	43,49	45,00
Kota Jayapura	16,19	12,21	12,22	12,06	11,46	11,37	12,59
Provinsi Papua	31,52	27,80	28,17	28,54	27,62	27,74	28,57

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

Kabupaten Deiyai memiliki tingkat kemiskinan tertinggi. Pada tahun 2013 tingkat kemiskinannya tercatat sebesar 47,52%, kemudian terlihat fluktuatif menurun hingga tahun 2018 mencapai 43,49% dengan rata-rata penurunan kemiskinan yang terlihat lambat yaitu sebesar -1,71% per tahun. Sedangkan kabupaten Merauke merupakan

kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah di Papua yang juga terlihat menurun yaitu dari 12,33% di tahun 2013 menjadi 10,54% di tahun 2018, atau dengan rata-rata penurunan sebesar -2,71% per tahun. Jika dipilah per kabupaten, yang tingkat kemiskinannya berada di atas rata-rata ada 17 kabupaten, yaitu Jayawijaya, Paniai, Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, Waropen, Supiori, Mambramo Raya, Nduga, Lanny Jaya, Mambramo Tengah, Yalimo, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya dan Deiyai.

Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja atau tingkat pengangguran terbuka (TPT) di provinsi Papua sepanjang periode 2013–2018 cenderung fluktuatif. Tahun 2013, TPT provinsi Papua tercatat sebesar 3,23%, kemudian perkembangannya terlihat meningkat yang fluktuatif hingga tahun 2017 menjadi 3,62%, selanjutnya di tahun 2018 angka TPT menurun sebesar -11,60% dibanding tahun 2017 hingga TPT provinsi Papua menjadi 3,20%. Rata-rata TPT provinsi Papua mencapai 3,47% atau rata-rata tumbuh sebesar 0,61% per tahun.

Tabel 3.6.
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2013–2018
(dalam persen)

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata ²
Merauke	4,95	3,80	9,08	6,12	3,16	1,72	4,81
Jayawijaya	0,74	0,30	0,06	0,33	0,59	0,65	0,45
Jayapura	6,43	13,80	14,03	13,71	13,39	10,71	12,01
Nabire	4,58	-	10,14	9,24	8,33	7,22	7,90
Kepulauan Yapen	6,14	5,50	7,54	6,16	4,77	5,05	5,86
Biak Numfor	8,81	9,30	10,08	8,71	7,33	7,13	8,56
Paniai	0,00	0,00	0,83	0,60	0,37	0,60	0,40
Puncak Jaya	0,92	0,90	0,89	0,78	0,66	0,91	0,84

Mimika	6,76	4,70	7,94	7,82	7,70	8,30	7,20
Boven Digoel	3,90	7,40	5,35	5,28	5,20	3,49	5,10
Mappi	2,15	11,30	2,94	4,67	6,39	2,88	5,06
Asmat	-	0,20	0,53	0,42	0,30	0,49	0,39
Yahukimo	0,22	0,20	0,55	0,28	0,00	0,86	0,35
Peg. Bintang	3,11	2,30	2,72	2,67	2,62	0,88	2,38
Tolikara	2,97	1,80	0,48	0,68	0,88	0,17	1,16
Sarmi	4,26	4,00	3,07	5,55	8,03	3,00	4,65
Keerom	5,17	2,20	4,19	4,03	3,87	6,00	4,24
Waropen	5,08	7,30	4,43	4,00	3,56	2,50	4,48
Supiori	11,98	19,20	10,75	8,14	5,53	8,11	10,62
Mamberamo Raya	3,21	-	3,15	5,06	6,97	2,58	4,19
Nduga	1,47	5,40	2,70	2,21	1,71	0,59	2,35
Lanny Jaya	0,00	0,00	0,00	0,22	0,44	0,69	0,23
Mamberamo Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,05
Yalimo	0,15	-	0,05	1,96	3,87	0,84	1,37
Puncak	2,04	1,20	0,96	0,79	0,61	0,90	1,08
Dogiyai	3,88	3,60	0,77	0,77	0,76	1,26	1,84
Intan Jaya	0,75	-	0,00	0,56	1,12	0,51	0,59
Deiyai	0,00	0,00	5,64	3,51	1,38	0,59	1,85
Kota Jayapura	9,84	9,60	10,37	11,38	12,39	10,22	10,63
Provinsi Papua	3,23	3,40	3,99	3,35	3,62	3,20	3,47

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

Jika diperhatikan persebarannya menurut kabupaten/kota, maka tingkat pengangguran terbuka terbesar sepanjang periode 2013–2018 terdapat di kabupaten Jayapura dengan rata-rata mencapai 12,01% atau tumbuh sebesar 18,33% per tahun. Posisi ke dua terbesar TPT ditempati oleh Kota Jayapura dengan rata-rata mencapai 10,63% atau tumbuh sebesar 1,34% per tahun. Posisi ketiga, TPT terbesar ditempati oleh kabupaten Supiori dengan rata-rata mencapai 10,62% atau tumbuh sebesar 1,31%. Sedangkan TPT kabupaten/kota di Papua

terendah atau di bawah 1% ditempati oleh kabupaten Jayawijaya, Paniai, Puncak Jaya, Asmat, Yahukimo, Lanny Jaya dan Intan Jaya.

3.3. Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Per Kapita

Pertumbuhan ekonomi Papua berdasarkan harga konstan 2010 secara umum mengalami pertumbuhan yang fluktuatif pada periode 2014–2017. Tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Papua tercatat sebesar 3,81persen kemudian meningkat pesat di tahun 2015 hingga mencapai 7,97%, namun di tahun 2016 terlihat melambat kembali hingga menjadi 4,64% dan selanjutnya meningkat pesat kembali di tahun 2017 hingga mencapai 7,33%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi Papua mampu tumbuh sebesar 5,94%.

Tabel 3.7.
Laju Pertumbuhan Ekonomi HK 2010 Dengan Tambang
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2013–2017
(dalam persen)

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	Rata ²
Merauke	8,49	7,74	6,88	7,66	7,46	7,65
Jayawijaya	7,31	7,07	6,28	4,66	5,52	6,17
Jayapura	10,2	11,27	9,95	8,54	7,03	9,40
Nabire	9,27	7,15	7,52	6,88	6,36	7,44
Kepulauan Yapen	7,35	6,93	6,26	5,42	4,51	6,09
Biak Numfor	7,02	5,29	6,62	4,06	-4,58	3,68
Paniai	6,96	8,69	9,82	7,54	4,04	7,41
Puncak Jaya	4,65	4,4	7,39	4,6	3,73	4,95
Mimika	9,48	-0,55	6,48	11,39	5,69	6,50
Boven Digoel	6,65	6,13	5,39	4,82	4,26	5,45
Mappi	5,21	8,26	6,85	6,92	7,32	6,91
Asmat	6,14	5,47	4,79	6,18	5,83	5,68
Yahukimo	6,76	7,03	7,14	5,2	6,85	6,60

Pegunungan Bintang	6,52	6,36	5,94	6,53	5,98	6,27
Tolikara	6,15	6,72	4,87	4,62	4,66	5,40
Sarmi	6,69	6,76	6,99	6,77	7,04	6,85
Keerom	9,59	8,79	7,02	5,74	4,93	7,21
Waropen	11,76	10,47	9,66	9,47	7,71	9,81
Supiori	4,26	6,46	4,25	4,43	4,01	4,68
Mamberamo Raya	9,17	9,72	10,3	8,08	6,45	8,74
Nduga	11,26	9,48	7,71	6,56	7,25	8,45
Lanny Jaya	8,31	7,45	6,6	5,81	5,39	6,71
Mamberamo Tengah	10,89	8,8	6,35	5,72	5,66	7,48
Yalimo	12,35	9,83	8,88	6,83	5,19	8,62
Puncak	9,19	9,4	9,43	7,56	6,69	8,45
Dogiyai	8,11	9,1	8,29	6,9	5,88	7,66
Intan Jaya	11,27	10,7	10,09	7,17	3,66	8,58
Deiyai	10,9	11,52	12,87	7,91	4,65	9,57
Kota Jayapura	10,35	10,19	8,48	7,24	6,01	8,45
Provinsi Papua	-	3,81	7,97	4,64	7,33	5,94

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

Jika diperhatikan per kabupaten/kota di Papua, maka terlihat bahwa sebagian besar mengalami pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil dan cenderung menurun, sedangkan pertumbuhan ekonomi untuk kabupaten Mappi, Yahukimo, dan Sarmi terlihat fluktuatif meningkat sepanjang periode 2013–2017.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi terdapat di kabupaten Waropen hingga mencapai 9,81% per tahun, kemudian disusul oleh kabupaten Deiya sebesar 9,57% dan kabupaten Jayapura sebesar 9,40%. Sedangkan kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terendah ditempati oleh Biak Numfor dengan rata-rata sebesar 3,68%, kemudian posisi ke dua dan ketiga terendah yaitu kabupaten Supiori sebesar 4,68% dan kabupaten Puncak Jaya sebesar 4,95%.

Perkembangan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku dengan tambang pada setiap tahun per penduduk, atau besarnya pendapatan rata-rata penduduk yang didapatkan dari hasil pembagian pendapatan regional dengan jumlah penduduk di Papua terlihat konsisten bertambah sepanjang periode tahun 2013–2017.

Tabel 3.8.
Pendapatan Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Tambang
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2013–2017
(juta rupiah)

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	Rata ²
Merauke	37,16	41,68	47,81	53,04	57,70	47,48
Jayawijaya	20,31	23,30	26,25	29,21	31,97	26,21
Jayapura	59,27	70,78	82,17	92,99	101,96	81,44
Nabire	42,92	48,69	54,98	60,63	65,98	54,64
Kepulauan Yapen	26,90	29,64	32,96	35,95	37,78	32,64
Biak Numfor	25,48	28,98	32,52	35,63	34,50	31,42
Paniai	13,71	15,59	17,76	20,01	21,81	17,78
Puncak Jaya	7,44	7,97	8,91	9,38	9,77	8,69
Mimika	266,06	252,51	268,99	334,13	371,96	298,73
Boven Digoel	47,39	51,99	56,27	60,70	64,64	56,20
Mappi	16,74	18,78	21,08	23,20	25,62	21,08
Asmat	15,36	17,13	18,50	20,21	21,86	18,61
Yahukimo	7,64	8,41	9,37	10,19	11,21	9,37
Peg. Bintang	15,55	16,71	18,27	20,28	22,05	18,57
Tolikara	7,20	7,99	8,59	9,23	9,86	8,57
Sarmi	39,90	44,75	50,01	54,92	60,11	49,94
Keerom	31,44	35,47	39,48	43,12	46,13	39,13
Waropen	39,25	44,68	49,94	55,60	59,79	49,85
Supiori	37,13	40,53	42,16	44,92	46,75	42,30
Mamberamo Raya	37,21	42,46	48,08	54,49	59,78	48,40
Nduga	7,05	7,60	8,58	9,47	10,50	8,64

Lanny Jaya	5,93	6,37	7,15	7,91	8,66	7,21
Mamb. Tengah	14,42	15,72	17,39	19,27	20,82	17,52
Yalimo	10,74	12,06	13,71	15,32	16,56	13,68
Puncak	6,53	7,55	8,70	9,76	10,65	8,64
Dogiyai	7,57	8,66	9,71	10,68	11,57	9,64
Intan Jaya	14,38	16,69	19,43	21,59	22,49	18,92
Deiyai	9,47	11,14	13,27	15,05	16,00	12,99
Kota Jayapura	64,48	74,57	81,57	90,12	95,97	81,35
Provinsi Papua	40,51	43,13	47,73	54,00	57,87	48,65

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

Rata-rata pendapatan per kapita provinsi Papua mencapai Rp 48,85 juta atau tumbuh sebesar 9,36% per tahun. Tahun 2013, pendapatan per kapita provinsi Papua tercatat sebesar Rp 40,51 juta kemudian meningkat menjadi Rp 57,87 juta di tahun 2017. Jika diperhatikan per kabupaten/kota, maka terlihat bahwa kabupaten yang menempati urutan pertama pendapatan per kapita tertinggi yaitu kabupaten Mimika dengan rata-rata sebesar Rp 298,73 juta atau tumbuh sebesar 9,24% per tahun. Posisi kedua dan ketiga dengan pendapatan per kapita terbesar yaitu kabupaten Jayapura dan kota Jayapura yang masing-masing mencapai Rp 81,44 juta dan Rp 81,35 juta atau tumbuh sebesar 14,58% dan 10,50% per tahun. Sedangkan kabupaten dengan rata-rata pendapatan per kapita terendah di provinsi Papua yaitu kabupaten Lanny Jaya sebesar Rp 7,21 juta atau tumbuh sebesar 9,94% per tahun, kemudian kabupaten Nduga sebesar Rp 8,64 juta atau tumbuh sebesar 10,50% per tahun dan kabupaten Puncak Jaya yaitu sebesar Rp 8,69 juta atau tumbuh sebesar 7,10% per tahun.

BAB IV

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Dana Prospek Papua

4.1. Tujuan dan Arah Kebijakan Umum Prospek Papua

Mengarah pada Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, maka melalui Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung (PROSPEK), pilar-pilar reformasi pelaksanaan pemerintahan dan fiskal daerah yaitu demokrasi, desentralisasi dan partisipasi masyarakat menjadi dasar sekaligus tujuan dalam pelaksanaan PROSPEK minimal selama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus masih berjalan di tanah Papua.

Atas dasar kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus diri sendiri sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat

maka mulai Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Provinsi Papua mengalokasikan dana untuk kegiatan pembangunan ekonomi dan penguatan kelembagaan masyarakat yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus. Dana PROSPEK adalah dana yang dipisahkan sebelum dibagi antara provinsi dan kabupaten/kota dengan persentase 20% (dua puluh persen) dan 80% (delapan puluh persen).

Adapun besaran dana PROSPEK setiap tahun disesuaikan dengan besaran Dana Otonomi Khusus yang diterima Pemerintah Provinsi Papua. Bantuan dana PROSPEK ke kampung/kelurahan dianggap penting karena:

- a. Selama ini kelembagaan masyarakat di tingkat kampung seperti: pemerintah kampung, kelembagaan masyarakat adat, kelembagaan agama serta organissai perempuan belum berjalan secara efektif karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola dan minimnya dana operasional;
- b. Selama ini kelompok ekonomi masyarakat di kampung seperti keluarga/rumah tangga, kelompok-kelompok usaha belum berpartisipasi aktif secara efektif dalam setiap proses dan tahapan pembangunan karena keterbatasan ruang maupun peran yang diberikan kepada mereka selaku subjek pembangunan;
- c. Tidak adanya kontinuitas bantuan dari pemerintah tingkat atas berupa kebijakan, program/kegiatan dan dukungan dana untuk pemberdayaan masyarakat di kampung/kelurahan.
- d. Memberikan kewenangan dan kepercayaan kepada masyarakat langsung untuk menentukan kebutuhan prioritas, merencanakan, mengambil keputusan secara transparan dan melaksanakan sendiri kegiatannya dengan penuh tanggung jawab serta diberikan bantuan dukungan pendampingan dan teknis yang dibutuhkan;

- e. Merupakan keberpihakan dan kepercayaan dari Pemerintah Provinsi Papua kepada masyarakat untuk bertindak sebagai subjek pembangunan.

Tujuan pemberian dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung untuk kampung / kelurahan, sebagai berikut.

1. Memberdayakan masyarakat kampung melalui desiminasi peningkatan kegiatan usaha produktif yang kreatif .
2. Mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan sumber daya lokal baik potensi maupun kapasitas masyarakat di kampung /kelurahan.
3. Meningkatkan standar hidup (*Level of living*) penduduk asli Papua baik dipandang dari sisi pendapatan, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan melalui peningkatan kegiatan ekonomi produktif dan kreatif di tingkat kampung.
4. Meningkatkan kemampuan kelembagaan lokal milik masyarakat.
5. Menciptakan atau menambah kemampuan (keahlian) penduduk asli Papua dalam melakukan kegiatan ekonomi produktif di tingkat kampung baik sisi produksi maupun pemasarannya.
6. Mempertahankan atau menjaga kelestarian budaya asli dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi generasi sekarang dan generasi mendatang.
7. Melembagakan keuangan mikro dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu.

4.2. Pengelolaan Dana Prospek Papua

4.2.1. Alokasi Total Dana Prospek Menurut Kabupaten/Kota

PROSPEK merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan ketertinggalan, perluasan kesempatan kerja melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di provinsi Papua. Program ini sangat menjawab harapan masyarakat di seluruh Tanah Papua. Oleh karena itu gubernur Papua merancang program pembangunan yang searah dengan percepatan pencapaian Visi Misi dan juga selaras dengan penguatan-penguatan Kampung.

Tabel 4.1.
Kabupaten Penerima dan Pengelola Dana Prospek Tahun 2016–2018

KAB./KOTA	2016	2017	2018
Asmat	17.234.334.000	21.983.975.000	20.938.645.000
Biak Numfor	23.469.955.000	26.659.300.000	25.416.538.000
Boven Digoel	14.437.498.000	11.141.200.000	10.611.440.000
Deiyai	4.709.868.000	6.664.825.000	6.347.915.000
Dogiyai	10.078.680.000	7.858.525.000	7.484.855.000
Intan Jaya	9.599.400.000	9.649.075.000	9.190.265.000
Jayapura	16.846.190.000	14.324.400.000	13.652.165.000
Jayawijaya	27.083.694.000	33.025.700.000	31.462.448.000
Keerom	7.765.885.000	9.052.225.000	8.621.795.000
Kep. Yapen	16.448.879.000	16.413.375.000	15.641.810.000
Kota Jayapura	5.063.031.000	3.780.050.000	3.838.965.000
Lani Jaya	17.773.384.000	35.313.625.000	33.636.252.000
Mamberamo Raya	8.015.537.000	6.863.775.000	5.495.210.000

Mamberamo Tengah	7.374.106.000	5.869.025.000	5.589.955.000
Mappi	18.307.286.000	16.313.900.000	15.541.734.000
Merauke	21.349.662.000	18.900.250.000	18.021.097.000
Mimika	20.229.742.000	15.120.200.000	14.435.003.000
Nabire	12.030.941.000	8.057.475.000	7.690.338.000
Nduga	4.720.928.000	24.669.800.000	23.496.760.000
Paniai	11.509.387.000	21.983.975.000	20.464.920.000
Peg. Bintang	36.232.960.000	27.554.575.000	26.244.365.000
Puncak	10.399.360.000	20.491.850.000	19.517.470.000
Puncak Jaya	36.609.000.000	30.339.875.000	28.902.556.000
Sarmi	8.352.322.000	9.350.650.000	8.909.584.000
Supiori	4.945.575.000	3.780.050.000	3.600.310.000
Tolikara	66.954.774.000	54.213.875.000	51.643.133.000
Yahukimo	64.914.545.000	50.831.725.000	48.416.472.000
Yalimo	3.671.312.000	29.842.500.000	28.423.500.000
Waropen	9.468.740.000	9.947.500.000	9.474.500.000
Total	515.596.975.000	549.997.275.000	522.710.000.000

Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2019

Kucuran dana prospek yang bersumber dari dana OTSUS tahun 2016–2018 mencapai angka Rp 1.588.304.250.000,- tentunya porsi anggaran yang cukup besar telah disediakan oleh Pemerintah Provinsi Papua untuk dikelola di seluruh kampung pada 29 kabupaten/kota di provinsi Papua. Pada tahun 2016 rata-rata alokasi dana Prospek dikabupaten/kota mencapai Rp 17.779.206.034,- sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp 18.024.482.759,-. Jika diselusuri lebih jauh terdapat 2 kabupaten yang memiliki penerimaan pendapatan Prospek Papua yang cukup besar dibandingkan dengan kabupaten lainnya yaitu kabupaten Tolikara dan Yahukimo. Di mana sepanjang tahun 2016–2018 telah mengelola dana Otsus Prospek

mencapai masing-masing Rp 172.811.782.000,- untuk kabupaten Tolikara sedangkan sejumlah Rp 164.162.742.000,- untuk kabupaten Yahukimo. Sementara itu, untuk alokasi yang cukup kecil adalah untuk kabupaten Supiori dan Kota Jayapura.

Tabel 4.2.
Alokasi Dana Prospek Menurut Wilayah Adat Ha Anim
Periode 2016–2018

KAB./KOTA	2016	2017	2018	JUMLAH
Asmat	17.234.334.000	21.983.975.000	20.938.645.000	60.156.954.000
Boven Digoel	14.437.498.000	11.141.200.000	10.611.440.000	36.190.138.000
Mappi	18.307.286.000	16.313.900.000	15.541.734.000	50.162.920.000
Merauke	21.349.662.000	18.900.250.000	18.021.097.000	58.271.009.000
Total	71.328.780.000	68.339.325.000	65.112.916.000	204.781.021.000

Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2019

Alokasi OTSUS Prospek untuk kabupaten/kota tentunya memiliki nilai strategis yang perlu dilihat kembali. Di mana untuk kabupaten dan kampung pada Wilayah Adat Ha Anim Periode 2016–2018 merupakan sumber pendapatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Adat Ha Anim. Sedangkan pada level provinsi merupakan nilai strategis pencapaian keberhasilan desain Prospek yang didanai oleh OTSUS. Diketahui ternyata untuk Wilayah Adat Ha Anim sepanjang tahun 2016–2018 memperoleh alokasi Prospek sebanyak Rp 204.781.021.000,- dengan proporsi kabupaten Asmat cukup besar yakni Rp 60.156.954.000,- disusul kabupaten Merauke sebanyak Rp 58.271.009.000,-. Namun secara keseluruhan total alokasi prospek mengalami penurunan dari tahun 2016 sebanyak Rp 71.328.780.000,- menjadi Rp 65.112.916.000,- pada tahun 2018.

Tabel 4.3.
Alokasi Dana Prospek Menurut Wilayah Adat La Pago
Periode 2016–2018
(dalam ribu)

KAB./KOTA	2016	2017	2018	JUMLAH
Jayawijaya	27.083.694	33.025.700	31.462.448	91.571.842
Lani Jaya	17.773.384	35.313.625	33.636.252	86.723.261
Mamberamo Tengah	7.374.106	5.869.025	5.589.955	18.833.086
Nduga	4.720.928	24.669.800	23.496.760	52.887.488
Peg. Bintang	36.232.960	27.554.575	26.244.365	90.031.900
Puncak	10.399.360	20.491.850	19.517.470	50.408.680
Puncak Jaya	36.609.000	30.339.875	28.902.556	95.851.431
Tolikara	66.954.774	54.213.875	51.643.133	172.811.782
Yahukimo	64.914.545	50.831.725	48.416.472	164.162.742
Yalimo	3.671.312	29.842.500	28.423.500	61.937.312
Total	275.734.063	312.152.550	297.332.911	885.219.524

Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2019

Sedangkan untuk Alokasi OTSUS Prospek untuk kabupaten/kota tentunya memiliki nilai strategis yang perlu dilihat kembali. Di mana untuk kabupaten dan kampung pada Wilayah Adat La Pago Periode 2016–2018 merupakan sumber pendapatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Adat La Pago. Sedangkan pada level provinsi merupakan nilai strategis pencapaian keberhasilan desain Prospek yang didanai oleh OTSUS. Diketahui ternyata untuk Wilayah Adat La Pago sepanjang tahun 2016–2018 memperoleh alokasi Prospek sebanyak Rp 885.219.524.000,- dengan proporsi kabupaten Tolikara cukup besar yakni Rp 172.811.782.000,- disusul kabupaten Yahukimo sebanyak Rp 164.162.742.000,-. Namun secara keseluruhan total alokasi prospek mengalami pe-

nurunan dari tahun 2017 sebanyak Rp 312.152.550.000,- menjadi Rp 297.332.911.000,- pada tahun 2018.

Tabel 4.4.
Alokasi Dana Prospek Menurut Wilayah Adat Me Pago
Periode 2016–2018

KAB./KOTA	2016	2017	2018	JUMLAH
Deiyai	4.709.868.000	6.664.825.000	6.347.915.000	17.722.608.000
Dogiyai	10.078.680.000	7.858.525.000	7.484.855.000	25.422.060.000
Intan Jaya	9.599.400.000	9.649.075.000	9.190.265.000	28.438.740.000
Mimika	20.229.742.000	15.120.200.000	14.435.003.000	49.784.945.000
NABIRE	12.030.941.000	8.057.475.000	7.690.338.000	27.778.754.000
PANIAI	11.509.387.000	21.983.975.000	20.464.920.000	53.958.282.000
TOTAL	68.158.018.000	69.334.075.000	65.613.296.000	203.105.389.000

Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2019

Sedangkan untuk Alokasi OTSUS Prospek untuk kabupaten/kota tentunya memiliki nilai strategis yang perlu dilihat kembali. Di mana untuk kabupaten dan kampung pada Wilayah Adat Me Pago Periode 2016–2018 merupakan sumber pendapatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Adat Me Pago. Sedangkan pada level provinsi merupakan nilai strategis pencapaian keberhasilan desain Prospek yang didanai oleh OTSUS. Diketahui ternyata untuk Wilayah Adat Me Pago sepanjang tahun 2016–2018 memperoleh alokasi Prospek sebanyak Rp 203.105.389.000,- dengan proporsi kabupaten Paniai cukup besar yakni Rp 53.958.282.000,- disusul kabupaten Mimika sebanyak Rp 49.784.945.000,-. Namun secara keseluruhan total alokasi prospek mengalami penurunan dari tahun 2017 sebanyak Rp 69.334.075.000,- menjadi Rp 65.613.296.000,- pada tahun 2018.

Tabel 4.5.
Alokasi Dana Prospek Menurut Wilayah Adat Saireri
Periode 2016–2018

KAB./KOTA	2016	2017	2018	JUMLAH
BIAK NUMFOR	23.469.955.000	26.659.300.000	25.416.538.000	75.545.793.000
KEP. YAPEN	16.448.879.000	16.413.375.000	15.641.810.000	48.504.064.000
SUPIORI	4.945.575.000	3.780.050.000	3.600.310.000	12.325.935.000
WAROPEN	9.468.740.000	9.947.500.000	9.474.500.000	28.890.740.000
TOTAL	54.333.149.000	56.800.225.000	54.133.158.000	165.266.532.000

Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2019

Tabel 4.6.
Alokasi Dana Prospek Menurut Wilayah Adat Mamta
Periode 2016–2018

KAB./KOTA	2016	2017	2018	JUMLAH
JAYAPURA	16.846.190.000	14.324.400.000	13.652.165.000	44.822.755.000
KEEROM	7.765.885.000	9.052.225.000	8.621.795.000	25.439.905.000
KOTA JAYAPURA	5.063.031.000	3.780.050.000	3.838.965.000	12.682.046.000
MAMBERAMO RAYA	8.015.537.000	6.863.775.000	5.495.210.000	20.374.522.000
SARMI	8.352.322.000	9.350.650.000	8.909.584.000	26.612.556.000
TOTAL	46.042.965.000	43.371.100.000	40.517.719.000	129.931.784.000

Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2019

Sedangkan untuk Alokasi OTSUS Prospek untuk kabupaten/kota tentunya memiliki nilai strategis yang perlu dilihat kembali. Di mana untuk kabupaten dan kampung pada Wilayah Adat Saireri Periode 2016–2018 merupakan sumber pendapatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Adat Saireri. Sedangkan pada level provinsi merupakan nilai strategis pencapaian keberhasilan desain Prospek yang didanai oleh OTSUS. Diketahui ternyata untuk

Wilayah Adat Saireri sepanjang tahun 2016–2018 memperoleh alokasi Prospek sebanyak Rp 165.266.532.000,- dengan proporsi kabupaten Biak Numfor cukup besar yakni Rp 75.545.793.000,- disusul kabupaten Kepulauan Yapen sebanyak Rp 48.504.064.000,-. Namun secara keseluruhan total alokasi prospek mengalami penurunan dari tahun 2017 sebanyak Rp 56.800.225.000,- menjadi Rp 54.133.158.000,- pada tahun 2018.

Sedangkan untuk Alokasi OTSUS Prospek untuk kabupaten/kota tentunya memiliki nilai strategis yang perlu dilihat kembali. Di mana untuk kabupaten dan kampung pada Wilayah Adat Mamta Periode 2016–2018 merupakan sumber pendapatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Adat Mamta. Sedangkan pada level provinsi merupakan nilai strategis pencapaian keberhasilan desain Prospek yang didanai oleh OTSUS. Diketahui ternyata untuk Wilayah Adat Mamta sepanjang tahun 2016–2018 memperoleh alokasi Prospek sebanyak Rp 129.931.784.000,- dengan proporsi kabupaten Jayapura cukup besar yakni Rp 44.822.755.000,- disusul kabupaten Sarmi sebanyak Rp 26.612.556.000,-. Namun secara keseluruhan total alokasi prospek mengalami penurunan dari tahun 2016 sebanyak Rp 46.042.965.000,- menjadi Rp 40.517.719.000,- di tahun 2018.

4.2.2. Peranan Dana Prospek Terhadap Pendapatan Kampung

Lokus Dana Prospek dititikberatkan pada pembangunan kampung di mana saat ini, sinergitas Dana Prospek dan Dana Desa menjadi upaya bersama dalam pembangunan kampung di provinsi Papua. Untuk itu, terdapat beberapa prinsip-prinsip sebagai dasar dalam pelaksanaan Prospek di kabupaten/kota dan kampung antara lain: Pemberdayaan, yaitu pengembangan potensi dan kapasitas masyarakat

kampung, Keberpihakan kepada Perempuan, yaitu wajib melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan sehingga kepentingan terwakili, Pembelajaran Bersama Masyarakat, yaitu sebagai proses pemberdayaan yang secara terus menerus dan berkesinambungan, Keberpihakan pada Orang Asli di Tanah Papua, yaitu proses pelaksanaan sampai dengan pemanfaatan hasil diutamakan bagi peningkatan kualitas hidup orang asli Papua, Kompetisi Sehat, yaitu seluruh warga kampung mendapat kesempatan yang sama untuk mengajukan usulan/pendapat. Kompetisi dimaksudkan untuk menghindari upaya dominasi dari individu dan kelompok, Perlindungan Hak Dasar, yaitu peningkatan perlindungan hak dasar terhadap sumber pendapatan asli Papua dan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat asli Papua.

Tabel 4.7.
Rerata Pendapatan Kampung Yang Bersumber Dari Dana Prospek
Periode 2016–2018

Kabupaten	Rerata Alokasi Kampung		
	2016	2017	2018
Asmat	123.988.014	99.475.000	94.745.000
Biak Fumor	127.554.103	104.957.874	100.065.110
Boven Digoel	132.454.110	99.475.000	94.745.000
Deyai	156.995.600	99.475.000	94.745.000
Dogiyai	127.578.228	99.475.000	94.745.000
Intan Jaya	112.934.118	99.475.000	94.745.000
Jayapura	132.647.165	103.053.237	98.217.014
Jayawijaya	129.587.053	100.688.110	95.922.098
Keerom	127.309.590	99.457.000	94.745.000
Kep. Yapen	145.565.301	102.583.594	97.761.313
Kota Jayapura	361.645.071	290.773.077	274.211.786
Lani Jaya	125.164.676	99.756.003	95.017.661
Mamberamo Raya	131.402.246	99.475.000	94.745.000
Mamberamo Tengah	124.984.847	99.475.000	94.745.000
Mappi	130.766.329	100.703.086	95.936.630
Merauke	133.435.388	105.587.989	100.676.520

Mimika	152.103.323	113.685.714	108.533.857
Nabire	144.951.096	111.909.375	106.810.250
Nduga	147.529.000	99.475.000	94.745.000
Paniai	164.419.814	101.777.662	94.745.000
Pegunungan Bintang	131.756.218	99.475.000	94.745.000
Puncak	129.992.000	99.475.000	94.745.000
Puncak Jaya	121.221.854	100.463.162	95.703.828
Sarmi	111.364.293	101.637.500	96.843.304
Supiori	130.146.711	99.475.000	94.745.000
Tolikara	123.761.135	100.210.490	95.458.656
Yahukimo	127.283.422	99.670.049	94.934.259
Yalimo	135.974.519	99.475.000	94.745.000
Waropen	133.362.535	99.475.000	94.745.000

Sumber: Data diolah, 2019

Transfer dana Prospek bagi kabupaten/kota tentunya memiliki peranan tersendiri bagi APBD kabupaten/kota di provinsi Papua. Sepanjang tahun 2016–2018 pemerintah provinsi Papua telah mengalokasikan anggaran prospek sebesar Rp 1.588.304.250.000,- bagi kabupaten/kota di provinsi Papua. Kabupaten Yahukimo dan Tolikara merupakan kabupaten yang memiliki alokasi cukup besar dibandingkan kabupaten lainnya. Hal ini disebabkan karena jumlah distrik/kampung yang cukup banyak. Menyimak rerata alokasi pada setiap kampung, dapat diindikasikan pola pembagian antar kabupaten ataupun antar kampung dalam satu kabupaten belum menunjukkan adanya unsur keadilan anggaran.

4.3. Pengaruh Dana Prospek Terhadap Pembangunan Sosial Ekonomi Provinsi Papua

Seperti halnya dengan pengelolaan sumber-sumber anggaran daerah lainnya, secara teoritis pengelolaan dana Prospek juga me-

miliki 3 (tiga) fungsi anggaran yaitu fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. **Fungsi alokasi**, artinya anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi, dan efektifitas perekonomian daerah. **Fungsi distribusi**, artinya kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dan, **Fungsi stabilitasi**, artinya anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara, dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Dalam implementasinya, ketiga fungsi anggaran ini telah dijabarkan pada tujuan prospek yang lebih aplikatif, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada pembahasan diawal. Di mana secara umum penyelenggaraan dana prospek diarahkan untuk mempercepat pembangunan sosial ekonomi dalam rangka untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan keteringgalan, perluasan kesempatan kerja melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di provinsi Papua. Untuk membuktikan apakah tujuan dari penggunaan dana Prospek tersebut telah tercapai, tidaklah mudah. Selain sangat rumit dan kompleks, menilai pencapaian tujuan tersebut juga harus melibatkan berbagai *stakeholder* yang menjadi pelaksana dan pemerhati program prospek ini. Termasuk juga memilih pendekatan yang digunakan, apakah kuantitatif atau kualitatif. Jika menggunakan pendekatan kuantitatif, maka lebih mengutamakan pengukuran yang berlaku secara general. Sedangkan jika kualitatif yang digunakan, ini berarti lebih fokus pada penilaian yang komprehensif dan holistik, dan tidak digeneralisasi.

Masing-masing pendekatan di atas memiliki keterbatasan yang cukup penting untuk diatasi dalam kaitannya menganalisis pencapaian tujuan dari prospek. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam evaluasi prospek kali ini digunakan pendekatan *mix method* yang mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan

maksud untuk menutupi keterbatasan yang terjadi bila masing-masing pendekatan itu digunakan secara terpisah. Seperti yang telah diurai dalam pembahasan sebelumnya bahwa model *mix method* yang digunakan dalam evaluasi ini adalah *Sequential Explanatory*, yang secara singkat merupakan model yang mendahulukan analisis kuantitatif, kemudian hasilnya diverifikasi dan dijustifikasi dengan analisis kualitatif. Oleh karena analisis kuantitatif yang didahulukan, ini berarti diawal analisis perlu adanya indikator yang akan dinilai, yaitu indikator-indikator tujuan dari pelaksanaan dana prospek. Akan tetapi, karena pada awal perencanaan penyelenggaraan program prospek tidak dilengkapi dengan indikator-indikator tujuan, akhirnya dalam evaluasi ini, berdasarkan hasil riviue dokumen, FGD dan publikasi data BPS, ditetapkan indikator-indikator tujuannya adalah IPM, Kemiskinan dan Pendapatan Per Kapita. Apabila memperhatikan karakteristik dan atribut dari masing-masing indikator makro tersebut, dapat dikatakan ketiganya sangatlah representatif sebagai *ultimate goal indicator* dari pelaksanaan program Prospek provinsi Papua yang mengarah kepada pembangunan di bidang kelembagaan kampung dan pemberdayaan ekonomi.

4.3.1. Analisis Kuantitatif

Profil dan perkembangan IPM, kemiskinan dan pendapatan per kapita, serta pelaksanaan dana Prospek selama periode 2014–2018 untuk 29 kabupaten yang menjadi lokasi pelaksanaan program prospek telah disampaikan dan diurai panjang lebar pada pembahasan sebelumnya. Dan berdasarkan serangkaian data yang disajikan tersebut, selanjutnya dilakukan analisis kuantitatif menggunakan model *Data Panel* dengan ketentuan bahwa Dana Prospek menjadi variabel bebas (mempengaruhi) yang menstimulus variabel-variabel terikat (dipengaruhi) yaitu IPM, kemiskinan, pendapatan per kapita, Indeks

Pembangunan Desa. Di mana semua variabel yang terlibat dalam model ini didisagregasi kedalam 29 kategori yaitu 29 kabupaten selama periode 2014–2018. Ini berarti total “N” (jumlah data) yang dilibatkan untuk mengevaluasi dampak Prospek terhadap IPM, kemiskinan, pendapatan per kapita, dan Indeks Pembangunan Desa masing-masing adalah sebanyak: 5 tahun x 29 kabupaten = 145 data. Jumlah data sebanyak ini sangat representatif untuk mengamati dan menganalisis perilaku dan respon dari ke-4 indikator makro tersebut ketika diberi injeksi atau stimulus dana Prospek.

Hasil pengolahan model Data Panel dalam kaitannya untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelaksanaan dana Prospek di provinsi Papua selama periode 2014–2018 disajikan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8.
Analisis Statistik Model Panel Data
Pengaruh Dana Prospek Terhadap Indikator Makro Papua

Variabel	IPM (indeks)		KEMISKINAN (%)		PENDAPATAN PER KAPITA (Rp juta)		INDEKS PEMBANGUNAN DESA (indeks)	
	Coef	p-value	Coef	p-value	Coef	p-value	Coef	p-value
C	43,6675	0,0000	39,1424	0,0000	57,6830	0,0698	68,0922	0,0072
Ln PROSPEK?	0,5157	0,1222	-0,4104	0,0864	-0,9398	0,4569	-1,3977	0,1893
Random Effects (Cross)								
ASM--C	-7,4935		-1,9541		-20,5976		-6,0405	
BNF--C	15,5062		-3,2608		-11,7009		10,5594	
BDG--C	4,4660		-9,2524		11,1619		-3,4527	
DYI--C	-6,2125		14,1464		-25,7480		0,2076	
DGY--C	-1,5149		0,9177		-27,7905		-2,7821	
ITJ--C	-9,8124		13,1595		-21,1290		-9,6822	

JYP--C	15,1341		-16,1977		33,1062		12,9988	
JYW--C	-0,1907		9,7320		-14,9215		1,6660	
KRM--C	9,4751		-12,8332		-2,8053		6,5149	
YAP--C	10,3998		-2,3166		-7,7671		4,0058	
KJP--C	23,9887		-18,3986		33,4143		26,0188	
LNJ--C	-9,7177		11,1577		-29,1180		-0,3478	
MBR--C	-5,1627		-0,0233		3,7623		-6,4498	
MBT--C	-9,9259		7,3575		-22,1281		-4,0236	
MAP--C	1,3130		-3,4690		-18,1615		-3,4308	
MER--C	12,7988		-18,5899		4,4544		12,2572	
MMK--C	16,5778		-14,7526		291,1212		-0,5584	
NBR--C	11,6390		-4,2016		10,3206		11,1982	
NDG--C	-27,7146		8,3981		-28,3822		-12,8071	
PAN--C	-0,7954		8,4819		-19,3646		1,3595	
PGB--C	-12,9591		1,7083		-17,6110		-9,3361	
PCK--C	-14,8161		8,5552		-28,7488		-11,2250	
PJY--C	-9,6366		7,3029		-27,3668		-8,2481	
SAR--C	6,7030		-15,7242		6,2394		2,9831	
SUP--C	6,1321		8,1316		-0,3866		12,2590	
TLK--C	-8,4753		4,1846		-27,2468		-10,7754	
WAR--C	8,4571		1,1567		8,9270		-0,9671	
YAH--C	-8,5344		10,7218		-27,0491		-6,9937	
YAL--C	-9,6289		5,8621		-24,4840		-4,9080	
R-squared	0,0274		0,0342		0,0066		0,0189	
R-determinant	0,0007		0,0012		0,0000		0,0004	

Adjusted R-squared	0,0159		0,0228		-0,0051		0,0073	
F-statistic	2,3925		3,0065		0,5633		1,6353	
Prob(F-statistic)	0,1256		0,0866		0,4550		0,2045	

Sumber: Data diolah, 2019

Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa model Data Panel yang reliabel dan valid digunakan dalam evaluasi prospek ini adalah model *Random Effect* (lihat lampiran tahapan pengujiannya). Selain itu, dengan maksud agar pembahasan model Data Panel lebih sederhana dan praktis, maka dipilih model Data Panel dengan koefisien slope yang konstan, namun intersep berbeda antar ruang (antar individu). Dan berikut ini, berdasarkan hasil pengujian model Data Panel akan disampaikan satu persatu bagaimana pengaruh program Dana Prospek terhadap variasi perubahan IPM, kemiskinan, pendapatan per kapita, dan Indeks Pembangunan Desa.

4.3.1.1. Analisis Pengaruh Dana Prospek Terhadap IPM

Merujuk kepada hasil pengolahan data yang disajikan pada Tabel 4.8 di atas teridentifikasi bahwa *p-value* dari *slope* pengaruh Dana Prospek terhadap IPM adalah sebesar 0.1222. Oleh karena $p\text{-value} = 0.1222 > \alpha = 0,05$ maka dapat diputuskan untuk mengatakan bahwa dana Prospek mempunyai pengaruh yang ***Tidak Signifikan*** pada tingkat kepercayaan 95% terhadap kenaikan IPM (tanda koefisien positif).

Pengaruh dari Prospek terhadap IPM adalah sebesar koefisien Ln Prospek = 0,515652 yang mengindikasikan setiap kenaikan dana Prospek sebesar 1% akan meningkatkan IPM sebesar 0,515652 poin.

Besaran koefisien *R-determinant* = 0,0007 menunjukkan bahwa secara statistik kontribusi dari dana Prospek terhadap variasi perubahan IPM adalah sebesar 0,74%, sisanya 99,30% disebabkan oleh faktor-faktor lain.

4.3.1.2. Analisis Pengaruh Dana Prospek Terhadap Kemiskinan

Seperti yang disajikan pada Tabel 4.8 terlihat bahwa *p-value* dari slope pengaruh Dana Prospek terhadap Kemiskinan adalah sebesar 0.0864. Oleh karena $0,10 < p\text{-value} = 0.0864 > 0,05$, maka dapat digeneralisasikan bahwa dana Prospek mempunyai pengaruh yang **Signifikan** pada tingkat kepercayaan 90% terhadap penurunan kemiskinan (tanda koefisien negatif)

Pengaruh dari Prospek terhadap Kemiskinan adalah sebesar koefisien Ln Prospek = -0,4104 yang mengindikasikan setiap kenaikan dana Prospek sebesar 1% akan menurunkan Kemiskinan sebesar 0,4104%.

Besaran koefisien *R-determinant* = 0,0012 menunjukkan bahwa secara statistik kontribusi dari dana Prospek terhadap variasi perubahan kemiskinan adalah sebesar 0,12%, sisanya 99,82% disebabkan oleh faktor-faktor lain.

4.3.1.3. Analisis Pengaruh Dana Prospek Terhadap Pendapatan Per Kapita

Pada Tabel 4.8 di atas terlihat bahwa *p-value* dari slope pengaruh Prospek terhadap pendapatan per kapita adalah sebesar 0.4569. Oleh karena $p\text{-value} = 0,4569 < 0,05$ maka dapat diindikasikan bahwa dana Prospek mempunyai pengaruh yang **Tidak Signifikan** pada

tingkat kepercayaan 95% terhadap kenaikan Pendapatan Per Kapita (tanda koefisien negatif).

Pengaruh dari Prospek terhadap Pendapatan Per Kapita adalah sebesar koefisien Ln Prospek = -0.9398 yang mengindikasikan setiap terjadi kenaikan dana Prospek sebesar 1% akan menurunkan Pendapatan Per Kapita sebesar 0.9398 juta rupiah

Besaran koefisien *R-determinant* = 0,0000 menunjukkan bahwa secara statistik kontribusi dari dana Prospek terhadap variasi perubahan Pendapatan Per Kapita adalah sebesar 0,0%, sisanya 100% disebabkan oleh faktor-faktor lain.

4.3.1.4. Analisis Pengaruh Dana Prospek Terhadap Indeks Pembangunan Desa (IPD)

Pada Tabel 4.8 di atas terlihat bahwa *p-value* dari *slope* pengaruh Prospek terhadap Indeks Pembangunan Desa (IPD) adalah sebesar 0,1893. Oleh karena *p-value* = 0,1893 < 0,05 maka dapat diindikasikan bahwa dana Prospek mempunyai pengaruh yang **Tidak Signifikan** pada tingkat kepercayaan 95% terhadap kenaikan Indeks Pembangunan Desa (IPD) (tanda koefisien negatif).

Pengaruh dari Prospek terhadap Indeks Pembangunan Desa (IPD) adalah sebesar koefisien Ln Prospek = $-1,3977$ yang mengindikasikan setiap terjadi kenaikan dana Prospek sebesar 1% akan menurunkan Indeks Pembangunan Desa (IPD) sebesar 1,3977 Poin IPD.

Besaran koefisien *R-determinant* = 0,0004 menunjukkan bahwa secara statistik kontribusi dari dana Prospek terhadap variasi perubahan Pendapatan Per Kapita adalah sebesar 0,04%, sisanya 100% disebabkan oleh faktor-faktor lain.

4.3.1.5. Rekapitulasi Pengaruh Dana Prospek Terhadap IPM, Kemiskinan, Pendapatan Per Kapita, dan Indeks Pembangunan Desa

Mengacu kepada hasil pengujian seluruh model Data Panel yang telah dijelaskan di atas, berikut ini disampaikan rekapitulasi dari pengaruh dana Prospek terhadap indikator-indikator makro sosial ekonomi provinsi Papua sebagai berikut.

Tabel 4.9.
Pengaruh, Efektivitas dan Kontribusi Dana Prospek Terhadap Indikator Makro Sosial Ekonomi Provinsi Papua

Independent Variable		Dependent Variable			
		Kemiskinan	Pendapatan Per Kapita	IPD*	
IPM					
Prospek (Data Panel 2016–2018 dan 29 Kab./kota)	Pengaruh →	Lemah dan positif	Kuat dan negatif	Lemah dan negatif	Lemah dan negatif
	Kontribusi →	0,07%	0,12%	0,0043%	0,04%

Sumber: data diolah (2019)

Pengaruh Dana Prospek terhadap kenaikan IPM dan pendapatan per kapita, serta penurunan kemiskinan dan IPD di provinsi Papua dapat dikatakan kurang signifikan ($p\text{-value} > \alpha$), namun demikian semuanya terindikasi belum efektif karena mempunyai angka elastisitas di bawah 1, masing-masing sebesar 0,1222 terhadap percepatan IPM, sebesar 0.0864 terhadap penurunan kemiskinan, sebesar 0.4569 terhadap kenaikan pendapatan per kapita, dan untuk IPD sebesar 0.1893. Selain itu terlihat kontribusinya sangat kecil sekali tidak lebih dari 1% terhadap variasi perubahan ketempat indikator makro sosial ekonomi tersebut.

Seluruh fakta statistik di atas mengindikasikan bahwa ada beberapa permasalahan yang cukup fundamental dalam pengelolaan Dana Prospek selama ini, baik itu menyangkut kuantitas (jumlah) Dana Prospek yang dikelola, maupun kualitas pengelolaannya. Seperti masih belum memadainya jumlah Dana Prospek yang dialokasikan ke setiap kabupaten, serta kurang optimalnya pengelolaan Dana Prospek mulai dari sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Terlihat jelas di mana sepanjang tahun 2016–2018 pengaruh prospek dapat diindikasikan mempengaruhi kenaikan IPM hanya sebesar 0,07 poin, sedangkan untuk kemiskinan diasumsikan mampu menurunkan kemiskinan di daerah kampung sebesar 0,41 poin, selanjutnya untuk pendapatan per kapita dan Indeks Pembangunan Kampung masing-masing hanya -0,93 poin dan -1,39 poin. Memang disadari pengelolaan dana prospek yang dikucurkan kepada setiap kampung ini, masih dijumpai berbagai kendala baik dalam perencanaan dan pelaksanaan. Tentunya perlu adanya ketegasan yang kuat dalam upaya peningkatan kontribusi Dana Prospek terhadap pencapaian indikator sosial ekonomi di provinsi Papua.

Untuk itu, diharapkan ke depannya program Prospek memiliki tujuan yang strategis dalam peningkatan kelembagaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah perkampungan. Sehingga perlu adanya pembenahan rujukan pelaksanaan program dan kegiatan yang secara langsung menunjang peningkatan pencapaian indikator sosial ekonomi di kabupaten/kota di provinsi Papua. Diharapkan ke depan dengan patokan rerata alokasi dana prospek pada setiap kabupaten yakni Rp 18.256.370.690,- mampu diarahkan pada kampung-kampung yang memiliki permasalahan sesuai dengan tujuan pelaksanaan prospek, sehingga pemerataan alokasi anggaran Prospek didasari oleh area yang perlu adanya injeksi pendanaan yang

lebih dalam kerangka mengupayakan percepatan pembangunan dana Prospek.

4.3.2. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif yang digunakan dalam evaluasi ini adalah *Content Analysis* atau Analisis Isi, Model Miles dan Huberman, serta Model Strous dan Corbin. Analisis ini bersumber pada dokumen-dokumen yang telah dipublikasikan sebelumnya yang dimaksudkan terutama untuk untuk menguji, menafsirkan dan bahkan untuk meramalkan. Lebih lanjut Moleong (2007) memberikan alasan-alasan kenapa studi dokumen berguna bagi penelitian kualitatif, di antaranya: (1) karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong; (2) berguna sebagai bukti (*evident*) untuk suatu pengujian; (3) berguna dan sesuai karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir, dan berada dalam konteks; dan (4) relatif murah dan tidak sukar ditemukan, hanya membutuhkan waktu.

Agar pemaparan Analisis Isi terhadap dokumen-dokumen yang terpilih lebih jelas, komprehensif dan terstruktur, maka digunakan juga analisis kualitatif lainnya yaitu model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (1992), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion* (kesimpulan). Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data. Display data

dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk: uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sebagainya. Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).

Oleh karena begitu banyaknya data dan informasi yang diperoleh dari analisis dokumen, reduksi data dan informasi memegang peranan yang sangat penting agar hasil evaluasi ini lebih fokus. Kegiatan reduksi data mencakup unsur-unsur spesifik termasuk didalamnya membuat *coding* data sesuai dengan kisi-kisi instrumen evaluasi. Menurut Strous dan Corbin (dalam Emzir, 2010) terdapat tiga jenis pengkodean utama yaitu pengkodean terbuka (*opening coding*), pengkodean berporos (*axial coding*), dan pengkodean selektif (*selective coding*). Secara garis besar, *open coding* ini adalah salah satu cara untuk mensegmentasikan informasi yang kita dapatkan. Dengan cara ini diharapkan peneliti dapat menentukan fokus apa yang ingi didapatkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Adapun *axial coding* merupakan tahap lanjutan dari tahapan *open coding* yang telah kita lakukan sebelumnya. *Axial coding* ini tujuannya untuk mengklasifikasikan konsep-konsep yang kita dapat pada tahap *open coding*. Kemungkinan pada tahap ini akan didapatkan konsep yang sama antar narasumber karena inti dari jawaban yang mereka sampaikan sama antara yang satu dengan yang lain. Terakhir, kalimat inti dari *selective coding* adalah di mana semua yang termuat dalam *axial coding* kita susun menjadi satu kalimat. Hal ini bisa dilakukan apabila

ada kesamaan jawaban ataupun adanya perbedaan jawaban. Intinya kita harus menggabungkan konsep yang ada menjadi satu kalimat yang ringkas dan mudah dipahami.

Terkait dengan evaluasi Prospek kali ini, maka pengkodean merujuk pada tata kelola program yang mencakup: (1) pencapaian kinerja program Prospek; (2) regulasi dan SOP/Juknis/Juklak program/kegiatan; (3) sumber daya manusia pelaksana program/kegiatan; (4) perencanaan program/kegiatan; (5) penganggaran program/kegiatan; (6) pelaksanaan program/kegiatan; (7) pengawasan program/kegiatan; dan (8) monitoring dan evaluasi.

4.3.2.1. Pencapaian Kinerja Program Prospek

Disadari sepanjang pelaksanaan Dana Prospek pada tingkat kabupaten/kota, telah banyak sekali dijumpai kegiatan-kegiatan kelembagaan kampung maupun aktivitas pemberdayaan ekonomi. Misalnya pada kabupaten Jayawijaya yang menyalurkan dana Prospek tahun 2016 sebanyak 199 kampung dan 2 kelurahan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain: (1) Pembangunan Kantor Kampung, (2) Pembangunan Jaringan Air Bersih, (3) Pembangunan Pustu, jika diamati memang kegiatan dana prospek telah menghasilkan output kegiatan namun sepatutnya diprioritaskan pada aktivitas pemberdayaan ekonomi rumah tangga di kampung. Sedangkan di kabupaten Asmat alokasi dana Prospek pada 7 distrik 139 kampung dilaksanakan kegiatan antara lain: (1) Pembangunan Rumah Masyarakat, (2) Pembangunan air bersih, (3) Pembangunan Jalan Kampung, (4) Pembangunan jaringan energi listrik kampung. Hal serupa sama halnya dengan kabupaten lain, di mana output dana prospek banyak terjadi pada bidang infrastruktur kampung,

sedangkan diketahui bersama banyak sekali sumber dana lain yang telah memprioritaskan pembangunan pada bidang infrastruktur kampung. Sehingga diharapkan proses rujukan kegiatan dan pengendalian dana prospek perlu di perketat oleh provinsi Papua.

4.3.2.2. Regulasi Dan SOP/Juknis/Juklak Program

Selama ini memang terdapat regulasi yang rutin diterbitkan setiap tahun anggaran yang berisikan Pedoman Pengelolaan Dana Program Strategis Pembangunan Ekonomi Dan Kelembagaan Kampung di mana memuat beberapa hal antara lain: Jenis-jenis Kegiatan, Alur Tahapan, Pelaku dan Peran dalam Pengelolaan Dana, Mekanisme Pencairan dan Penggunaan Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Hambatan dan Kendala, Pengendalian dan *Monitoring* Evaluasi.

Namun berdasarkan hasil temuan lapangan terdapat beberapa kendala yang diperoleh dari lapangan mengenai ketersediaan Regulasi Dan Sop/Juknis/Juklak Program Strategis Pembangunan Ekonomi Dan Kelembagaan Kampung. Kejelasan pelaksanaan penggunaan dana prospek perlu rutin disosialisasikan kepada kabupaten/kota dan juga kampung sebagai pelaksana program/kegiatan dana Prospek. Kaitannya dengan hal ini, keberadaan kelengkapan SOP/Juknis telah tersedia namun belum maksimal disosialisasikan pada tingkatan pelaksana pada tingkat kampung.

4.3.2.3. Sumber Daya Manusia Pelaksana Program

Dalam pengelolaan Dana Prospek terdapat beberapa kelompok ataupun level pelaku program prospek antara lain provinsi Papua,

kabupaten/kota, distrik, dan kampung. Yang memiliki tugas dan peran yang berbeda dalam mengawal pengelolaan Dana Prospek. Berdasarkan hasil temuan opini lapangan banyak dijumpai kurangnya harmonis koordinasi dan komunikasi pengelolaan program prospek antar pelaku pelaksana program Prospek, hal ini merupakan sumber utama berbagai tantangan dalam pelaksanaan program pada level kabupaten/kota ataupun kampung, berikut disajikan tugas dan peran pelaku program prospek di provinsi Papua.

Tabel 4.10
Pelaku Dan Peran Program Prospek

NO.	PELAKU	FUNGSI (Peran)
PROVINSI		
1.	Tim Koordinasi	Koordinasi/sinkronisasi perencanaan, monitoring dan evaluasi.
2.	Dinas PMK Provinsi Papua/Satker Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola pelaksanaan PROSPEK sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi. 2. Menyusun Pedoman Pengelolaan dan Penetapan Besar Alokasi Dana. 3. Mengajukan usulan tambahan biaya apabila terjadi kekurangan di dalam pagu yang digunakan untuk pembiayaan BLM ataupun pendamping profesional kepada Pemerintah Provinsi Papua sebagai bahan pertimbangan dalam rangka revisi DPA Provinsi. 4. Membantu Pemerintah Provinsi melakukan rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan pendamping profesional sesuai dengan panduan yang ditetapkan. 5. Mengelola kontrak individual pendamping dan administrasi kontraktual, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) Mengelola dokumen kontrak kerja antara Satker Provinsi dengan pendamping profesional; b) Menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) untuk pendamping profesional; c) Mengadministrasikan dokumen kontrak individual; d) Melakukan pembayaran dan pengadministrasian pembayaran sebagai berikut.

		<ul style="list-style-type: none"> i. Membuat Daftar Nominatif Pembayaran Honorarium dan Tunjangan (DNPHT) Pendamping Profesional; ii. Menyalurkan honorarium, tunjangan dan biaya operasional sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan; iii. Memastikan pembayaran honorarium, tunjangan dan biaya operasional diterima tepat waktu oleh pendamping profesional; e) Menerbitkan surat PHK terhadap pendamping profesional apabila terjadi pelanggaran kontrak kerja yang dilakukan oleh pendamping profesional; f) Mengelola laporan individual pendamping profesional. <p>6. Melaksanakan fungsi administrasi umum yaitu menerbitkan undangan yang dibutuhkan dalam rangka keperluan rapat, pelatihan, workshop dan kegiatan penunjang lain yang diselenggarakan di provinsi.</p> <p>7. Membina dan mengendalikan pendamping profesional dari aspek kineja, administrasi dan koordinasi yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Supervisi pengelolaan administrasi yang dikelola oleh pendamping profesional; b) Memberikan teguran secara tertulis terhadap pendamping profesional yang tidak memenuhi kewajiban kontraktual; c) Mengelola dan melakukan pemutakhiran data pendamping secara berkala bulanan yang ditetapkan dalam dokumen Data Induk Pendamping; d) Melakukan evaluasi kinerja dan menyampaikan rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja pendamping profesional sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan. e) Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pelaksanaan PROSPEK. <p>8. Menyusun laporan.</p>
3.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua	<p>Mewakili Pemerintah Provinsi Papua dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengalokasikan dan menyalurkan dana BLM ke Kas Daerah Kabupaten/Kota - Mengalokasikan Dana Pembiayaan administrasi Program (PAP) melalui Dinas PMK Provinsi Papua.

		<ul style="list-style-type: none"> - Menerbitkan SP2D ke Bank Papua Pusat dan Dinas PMK Provinsi Papua.
4.	Bank Papua Pusat	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penyaluran dana BLM ke Kabupaten/Kota; - Melakukan penyaluran dana pendampingan dan PAP kepada rekening khusus Dinas PMK Provinsi. - Melakukan pengendalian dan pembimbingan kepada semua petugas Cabang Bank Papua di masing-masing Kabupaten/Kota terkait dengan mekanisme transaksi pencairan dana BLM PROSPEK. - Memberikan laporan bulanan tentang realisasi pencairan dana di tiap Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Papua melalui Kepala Dinas PMK Provinsi Papua yang <i>ter-update</i>.
5.	Koorprov dan Tenaga Ahli Madya	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua khususnya dengan Dinas PMK Provinsi Papua / Satker Provinsi - Memfasilitasi pendamping profesional dalam pengelolaan dokumen administrasi - Memfasilitasi penyediaan dan pemutakhiran data untuk kepentingan pembayaran honorarium dan tunjangan pendamping profesional - Membantu Satker Pusat dan Satker Provinsi dalam proses rekrutmen dan pengelolaan pendamping profesional - Melaksanakan evaluasi kinerja pendamping profesional - Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pelaksanaan PROSPEK - Menyusun laporan pembinaan dan pengendalian pendamping profesional dan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi melalui Dinas PMK Provinsi Papua.
KABUPATEN/KOTA		
1.	Kepala Badan Keuangan Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima Dana BLM Dari BPKAD Provinsi Papua melalui Bank Papua Pusat. - Menerima SPM Dari KPA (Kepala Dinas PMK Kab/ Kota) dan Menerbitkan SP2D ke Bank Papua Cabang. - Dana BLM PROSPEK merupakan sebagai penerimaan bukan sebagai pendapatan Daerah Kab / Kota
2.	Dinas PMK Kabupaten / Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan pendamping profesional dengan <i>stakeholder</i> di wilayahnya, sehingga akan mempermudah tugas-tugas para pendamping profesional.

		<ul style="list-style-type: none"> - Memverifikasi seluruh dokumen administrasi pengajuan pancairan dana BLM PROSPEK dari kampung; - Menerbitkan SPM dan mengajukan kepada Kas Daerah Kab/Kota. - Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan PROSPEK. - Menerima Laporan Pelaksanaan kegiatan PROSPEK dari kepala kampung dan Tenaga Ahli Kabupaten. - Menyusun Laporan dan menyerahkannya kepada Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas PMK Provinsi Papua.
3.	Kantor Cabang/Kas Bank Papua Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan transaksi penyaluran dana BLM ke Rekening Kampung sesuai SP2D yang diterbitkan oleh Kas Daerah Kab/Kota; - Menyiapkan dana yang dapat memenuhi kebutuhan PROSPEK; - Memberikan laporan bulanan realisasi penyaluran dana BLM kepada KPA atau Kepala Dinas PMK Kabupaten/Kota, Tenaga Ahli Kabupaten. - Memberikan Rekening Koran Kepada Nasabah PROSPEK tanpa dikenakan Biaya.
4.	Tenaga Ahli Kabupaten /Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi dengan Pemerintah daerah Kabupaten; - Melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas PMK Kabupaten; - Membantu Dinas PMK Kabupten pada saat verifikasi seluruh dokumen administrasi pengajuan pancairan dana BLM PROSPEK dari kampung - Melaksanakan monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan Pendamping Kampung dan Pendamping Lokal Kampung; - Memeriksa laporan individu dan laporan progres pendamping Kampung setiap bulan. - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas PMK Kab/Kota setiap bulan; - Evaluasi Kinerja Pendamping Kampung per Triwulan; - Melaporkan keberadaan Pendamping Kampung setiap bulan; - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator Provinsi Papua setiap bulan

		- Setiap TA melaksanakan Tupoksinya sesuai dengan SOP Pengendalian.
DISTRIK		
1.	Kepala Distrik	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan pendampingan, pembangunan, dan pemberdayaan di wilayahnya - Melakukan pembinaan dan koordinasi dengan seluruh pelaku tingkat distrik dan kampung - Melaporkan pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan oleh seluruh kampung kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMK Kabupaten/kota; - Melaporkan tentang ketidakberadaan atau penyimpangan yang dilakukan pendamping secara berjenjang; - Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap proses pencairan, penyaluran, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan yang dibuat oleh Kepala kampung dan bendahara Kampung;
2.	Pendamping Kampung (Distrik)	<ul style="list-style-type: none"> - Pendamping Kampung mempunyai tugas pokok dan fungsi mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerja sama antardesa, pengembangan BUMDes, dan fasilitasi pembangunan yang berskala lokal desa, - Melakukan pendampingan dalam rangka pengendalian dan pembinaan kepada Kepala Kampung, Bendahara Kampung, P2DP dan Kelompok penerima manfaat terhadap pencairan, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan; - Melaksanakan monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan Pendamping Lokal Kampung; - Memeriksa laporan individu dan laporan progres pendamping Lokal Kampung setiap bulan. - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Distrik setiap bulan; - Evaluasi Kinerja Pendamping Lokal Kampung per Triwulan; - Melaporkan keberadaan Pendamping lokal Kampung setiap bulan; - Membuat laporan individu dan laporan progres kepada Tenaga Ahli Kabupaten - Memfasilitasi <i>Design</i> dan RAB baik fisik maupun non fisik. - Melaksanakan tugas sesuai SOP yang berlaku untuk Pendamping (Tidak Melanggar Kode Etik)

KAMPUNG/KELURAHAN		
1.	Kepala Kampung/ Lurah	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pembinaan dan koordinasi dengan seluruh pelaku di tingkat kampung; - Melakukan pemeriksaan/verifikasi Rencana penggunaan Dana (RPD) dan Laporan penggunaan dana (LPD) yang diajukan oleh P2DP; - Menyetujui pencairan dana dan menandatangani slip penarikan dana dari Rekening Kampung/Kelurahan.
2.	Pokja pelaksana dana PROSPEK (P2DP).	<ul style="list-style-type: none"> - Pokja P2DP terdiri dari Ketua dan Bendahara yang terpilih dalam muskam; - Biaya administrasi dan Insentif Pokja diambil dari BLM PROSPEK sebesar 10%. - Mengelola dana BLM dan kegiatan; - Membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD/SPJ); - Menyampaikan laporan penggunaan dana (LPD/SPJ) pada saat musyawarah Kampung/Kelurahan Pertanggungjawaban.
3.	Pendamping Lokal Kampung (PLK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas Pendampingan <ol style="list-style-type: none"> a) Mendampingi Desa dalam perencanaan pembangunan dan keuangan desa b) Mendampingi masyarakat Desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa. c) Mendampingi desa dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan desa. 2. Tugas Administratif <ol style="list-style-type: none"> a) Menyusun laporan individu yang dilampiri dengan dokumen LWK, realisasi kerja harian, formulir kunjungan, rencana kerja harian, serta bukti pendukung lainnya; b) Menyampaikan laporan individu kepada Pendamping Desa dan Satker Provinsi dengan dilampiri oleh dokumen: LWK, realisasi kerja harian, formulir kunjungan, rencana kerja harian, serta bukti pendukung lainnya; c) Menyerahkan <i>copy</i> NPWP dan bukti pembayaran pajak tahunan (SPT) kepada Satker Provinsi melalui TA Kabupaten; d) Menyampaikan dokumen Rencana Kerja Harian Pendamping Lokal Desa kepada Pendamping Desa untuk dimintakan persetujuan;

		<p>e) Mengurus secara mandiri terhadap klaim asuransi atas dirinya;</p> <p>f) Menyampaikan laporan program kepada Satker Provinsi melalui PD secara tepat waktu.</p>
--	--	--

Sumber: Pedoman Prospek tahun 2018

4.3.2.4. Perencanaan dan Penganggaran Program/Kegiatan

Lokus pelaksanaan kegiatan dana Prospek berada di Kampung, di mana aparat kampung merupakan aktor pelaksana program kegiatan kampung. Pada tahapan perencanaan program/kegiatan telah terdapat beberapa rujukan kegiatan dalam pedoman prospek, antara lain:

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan lokal milik masyarakat.
2. Peningkatan Kapasitas SDM melalui pelatihan baik bidang kelembagaan dan ekonomi.
3. Melembagakan keuangan mikro dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu.
4. Penyediaan Sarana/Prasarana yang dapat menunjang kegiatan Sosial Ekonomi bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
5. Perluasan Kesempatan berusaha dan Peluang Pengembangan Usaha bagi Masyarakat, guna meningkatkan kualitas hidup dalam bentuk pemenuhan makanan & Gizi, Pendidikan & Kesehatan.

Sedangkan untuk kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan melalui dana prospek ialah sebagai berikut.

1. Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor dan tempat ibadah;
2. Pembiayaan gaji pegawai negeri;
3. Pembelian kapal ikan yang berbobot di atas 10 (sepuluh) ton dan perlengkapannya;

4. Pembelian *chainsaw*, senjata, bahan peledak, asbestos dan bahan-bahan lain yang merusak lingkungan;
5. Pembiayaan kegiatan yang mempekerjakan anak-anak di bawah usia kerja;
6. Pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik;
7. Pembiayaan apa pun yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata;
8. Pembelian pupuk kimiawi, obat pertanian kimiawi (insektisida, pestisida, herbisida dan sebagainya).

4.3.2.5. Pelaksanaan Program/Kegiatan

Pelaksanaan program Prospek diyakini telah berjalan cukup baik sepanjang ini, hal ini terlihat jelas dari beberapa hasil testimoni masyarakat dan juga beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan di kampung. Namun disadari pelaksanaan program prospek masih dijumpai beberapa kendala. Sesuai dengan analisis pada bab sebelumnya, kontribusi prospek terhadap indikator yang merupakan bentuk cerminan kinerja pemerintah daerah telah mampu ditunjukkan walaupun sangat kecil. Dari segi pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh prospek, masih dijumpai pada kesalahan-kesalahan pada perencanaan. Di mana, belum berjalannya pedoman kegiatan yang perlu di dibiayai oleh dana Prospek. Selain itu juga, mekanisme perencanaan prospek belum maksimal terakomodir dalam musrenbang kampung. Oleh sebab itu, dana Prospek ialah Dana OTSUS maka perlu adanya kejelasan dalam penetapan program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan di kampung. Sehingga kontribusi prospek dapat meningkat di tahun-tahun mendatang.

4.3.2.6. Pengawasan Program/Kegiatan

Minimnya pengetahuan masyarakat OAP terhadap keberadaan program Prospek menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat OAP dalam melakukan pengawasan. Di mana rendahnya pengetahuan masyarakat tersebut lebih disebabkan kurang memadainya sosialisasi penyelenggaraan Program Prospek. Kondisi seperti ini ditemukan pada sebagian besar kabupaten pelaksana program Prospek.

4.3.2.7. Monitoring Dan Evaluasi

Dapat dipastikan M&E Framework dan M&E Plan untuk penyelenggaraan Program Prospek, baik itu di tingkat pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota, tidak ada yang membuatnya. Sehingga dapat dikatakan *monitoring* dan evaluasi Program Prospek yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota selama ini berjalan kurang terarah.

Dengan berbagai elemen dalam melihat permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan dana Prospek selama ini di provinsi Papua Selanjutnya, dengan menggunakan pendekatan kualitatif ditemukan bahwa yang menjadi akar penyebab kurang efektifnya program Prospek karena beberapa hal, yaitu:

Tabel 4.11
Pemetaan Hambatan/Permasalahan Pengelolaan Dana Prospek di Provinsi Papua

No.	Kabupaten	Input	Proses	Output	Outcome / Impact
1.	Deiyai	Dana Prospek setiap kampung masih dialokasikan sama rata baik antara Kampung maupun Kabupaten/Kota			

		Kemampuan pendamping dalam mengorganisir persoalan ² pelaksanaan dana PROSPEK	
2.	Dogiyai	Tenaga pendamping beberapa kali mendapatkan ancaman langsung, jika setiap pencairan setiap tahapan tidak sesuai dengan besaran yang mereka pahami	
		Belum adanya kejelasan dari Provinsi mengenai mekanisme teknis dana yang tidak dapat disalurkan ke kampung	Tahun 2015–2017 telah ditransfer ke KASDA, namun dana tersebut tidak dapat dilanjutkan ke Kampung
3.	Nabire	Perlu adanya penguatan-penguatan mengenai JUKNIS/JUKLAK dari Provinsi	
		Alokasi dana jangan berkisar 100 juta, kalau bisa disesuaikan dengan kondisi karakteristik permasalahan setiap kampung	
		Ke depan program PROSPEK perlu dilanjutkan, namun diharapkan adanya kejelasan kewenangan baik dari Provinsi, Kabupaten, Distrik, Kampung dan Tenaga Pendamping	
4.	Merauke	Perlu adanya penyesuaian mekanisme perencanaan penganggaran antara Provinsi (Agenda Transfer) dan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK)	Tahun Anggaran 2016–2017 alokasi dana PROSPEK belum tersalurkan hingga mencapai kurang-lebih 42 milyar
		Provinsi perlu menetapkan program/kegiatan yang perlu	

		didanai oleh PROSPEK di setiap Kampung, sehingga Kabupaten dapat melakukan <i>monitoring</i> terhadap hal tersebut			
		Perlu secara berkelanjutan untuk memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada aparat Kampung mengenai tujuan PROSPEK ini			
5.	Kabupaten Jayapura	Transfer dana PROSPEK sering menjelang akhir tahun, sehingga menyulitkan kabupaten/kampung dalam proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban	Belum adanya mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan yang dibiayai oleh PROSPEK		
		Kalau bisa dana PROSPEK tidak dialokasikan kepada masing-masing OPD, karena Kampung sudah mampu mengelola uang, buktinya dana desa yang mendekati 1 milyar mampu dikelola oleh Kampung			
		Penetapan ABPK telah dilaksanakan pada bulan Januari, sedangkan Juknis dan Juklak PROSPEK baru disediakan di bulan Juni			
6.	Jayawijaya	Jika terdapat JUKNIS/JUKLAK yang diterbitkan di provinsi Papua, tolong itu diberikan kepada kami, sehingga kami dapat tindak lanjuti pada pelaksanaan program/kegiatan PROSPEK			

Pelaksanaan program/kegiatan yang hanya mengejar target semata tanpa memperhatikan kualitasnya cenderung menyebabkan

output yang dihasilkan hanya dapat digunakan untuk beberapa waktu saja. Hal ini dikarenakan kualitas bahan yang digunakan kurang begitu diperhatikan yang akhirnya menyebabkan *output* cepat rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lebih lama. Kondisi ini mengakibatkan tujuan dari prospek itu menjadi kurang efektif dicapai, sehingga kontribusinya terhadap percepatan IPM, penurunan kemiskinan, dan peningkatan pendapatan per kapita dan IPD terlihat masih cenderung rendah.

Petunjuk teknis yang ada selama ini hanya pada penyaluran dan pengelolaan Dana Prospek saja, sementara untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersumber pada dana program tersebut hampir sebagian besar tidak dilengkapi dengan petunjuk teknis. Akibatnya penerima manfaat program mengalami kesulitan untuk memanfaatkannya secara maksimal, sehingga tujuan yang diharapkan dari penyelenggaraan Prospek.

Banyak kegiatan yang bersumber pada dana Prospek selalu tidak berlanjut sampai pada peningkatan kapasitas dan atau penguatan sumber daya yang melaksanakannya sebagai penerima manfaat. Sebagai misal pemberian bantuan peralatan produksi dalam upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi rakyat ternyata tidak didukung dengan pendanaan untuk pelatihan dan pendampingan dalam memanfaatkan bantuan tersebut. Akibatnya setelah bantuan diterima, penerima manfaat dari masyarakat OAP tidak mampu secara maksimal menggunakan peralatan produksi tersebut, sehingga banyak bantuan yang akhirnya tidak digunakan lebih lanjut, dan terbengkelai. Kondisi ini menyebabkan tujuan dari Prospek yang telah ditetapkan sebelumnya menjadi kurang efektif dicapai.

Akibat kurangnya kemampuan aparaturnya perencanaan dana Prospek dalam mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan masyarakat OAP,

menyebabkan banyak kegiatan Prospek yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, sehingga terlihat kurang bermanfaat. Hal ini terjadi pada semua sektor pembangunan, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan hingga pengadaan infrastruktur dasar kampung. Pada akhirnya kondisi tersebut menyebabkan tujuan dari Prospek menjadi kurang efektif dicapai.

Isu-Isu Strategis Dan Rekomendasi Kebijakan

5.1. Isu-Isu Strategis

Merujuk kepada hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, baik itu berdasarkan hasil analisis dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif, maka dapat diidentifikasi beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah provinsi di masa mendatang sebagai berikut.

Pertama, secara kuantitatif telah dibuktikan bahwa Program Prospek memiliki pengaruh yang masih cenderung kecil terhadap pengentasan kemiskinan di provinsi Papua. Hal ini dapat diindikasikan belum matangnya proses penetapan kegiatan prioritas yang perlu

diberikan oleh Pengelola pada level provinsi untuk di intervensi pada tingkatan kabupaten dan kampung. Selain itu juga, perlu adanya kualitas konsep perencanaan Prospek di kampung sehingga adanya pemetaan permasalahan pembangunan OAP yang dapat dibiayai oleh Dana Prospek. Sepatutnya dengan dana yang cukup besar mampu mendorong percepatan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan ekonomi rumah tangga OAP yang lebih baik.

Kedua, berdasarkan hasil evaluasi menggunakan pendekatan kualitatif ditemukan bahwa permasalahan yang cukup fundamental sehingga menyebabkan kurang efektifnya program Prospek tersebut adalah:

1. Komunikasi dan Koordinasi antarpelaku dan peran pengelola Prospek belum berjalan optimal, untuk itu perlu adanya konsep yang matang dalam membangun mekanisme pengelolaan program pembangunan.
2. Terindikasi adanya ketidaksinambungan dalam logika manajemen kinerja. Terlihat jelas terdapat banyak sekali permasalahan pada level input, namun pelaksanaan program/kegiatan tetap dilaksanakan. Hal ini yang berkontribusi lemahnya pencapaian *Outcome* program Prospek.
3. Petunjuk Teknis kurang disosialisasikan dengan matang sehingga, pada beberapa lokus terjadi kelemahan komunikasi perencanaan program.
4. Akibat kurangnya transparansi penyelenggaraan program Prospek, dan masih rendahnya keinginan masyarakat OAP untuk mengikuti kegiatan sosialisasi program, menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat OAP dinilai rendah terhadap pelaksanaan dan pengawasan program.

5. Di tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten yang menjadi sasaran program, belum ada yang memiliki *M&E Framework* dan *M&E Plan* yang berkualitas baik. Sehingga pelaksanaan evaluasi sering kali hanya bersifat rutinitas, yang cenderung sebatas laporan *output*. Akibatnya tidak dapat diketahui dan diidentifikasi dengan tepat dan menyeluruh kegiatan-kegiatan Prospek apa saja yang perlu direkomendasikan untuk dihentikan, dilanjutkan, direvisi atau direplikasi.

Ketiga, sumber dana Prospek adalah dana Otsus Papua yang sifatnya temporer dan *crash program*, sehingga suatu saat jika dana Otsus Papua tidak diberikan oleh pemerintah pusat, maka dipastikan pelaksanaan program Prospek ini akan terhenti, padahal sebelumnya sudah dibuktikan bahwa program ini mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap percepatan pembangunan sosial ekonomi di wilayah Papua, meskipun terukur kontribusinya masih sangat kecil.

5.2. Rekomendasi Kebijakan

Mengacu pada beberapa temuan pada pembahasan di atas mengenai pengelolaan Dana Prospek di provinsi Papua, selain itu juga mengingat urgensi dari keberlanjutan program Prospek di provinsi Papua. Maka terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu ditindaklanjuti oleh pengelola program Prospek sebagai berikut.

1. ***Revitalisasi Konsep Pengelolaan Program antarpelaku dan peran Pengelola program***

Banyak dijumpai permasalahan pada level komunikasi, di mana terdapat peran yang telah baku dalam regulasi/pedoman penggunaan dana Prospek, namun nyatanya belum berjalan optimal dalam pelaksanaannya.

2. ***Mengembangkan Sistem M&E Prospek melalui pembuatan M&E Framework dan M&E Plan yang berkualitas baik***

Sistem M&E yang terbentuk bukan hanya pada aspek pelaksanaan evaluasi saja, namun juga sampai pada pelaporan mulai dari laporan bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan, hingga akhir program. Selain itu, agar M&E *Framework* dan M&E *Plan* Program Prospek lebih berkualitas maka diperlukan adanya *baseline survey* terutama untuk survei data terpilah OAP dan non OAP.

3. ***Meningkatkan kualitas capaian kinerja program***

Upaya pencapaian target dengan hanya mengejar kuantitasnya menyebabkan *output* yang dihasilkan tidak dapat bertahan lama akibat cepat mengalami kerusakan. Karenanya pada saat penyelesaian suatu kegiatan Prospek penting sekali untuk diperhatikan juga kualitas bahan-bahan yang digunakan, dan pemenuhan standar yang sesuai.

4. ***Melengkapi dan memperluas Juknis (Petunjuk Teknis) dan Panduan pogram/kegiatan di tingkat kabupaten sasaran***

Juknis dan panduan tersebut sangat diperlukan sekali oleh penerima manfaat, agar mereka dapat menggunakan dan memanfaatkan bantuan program tersebut secara maksimal, terutama Juknis dan panduan yang terkait dengan penggunaan alat-alat produksi.

5. ***Meningkatkan kualitas perencanaan program***

Kualitas perencanaan merupakan pintu masuk pelaksanaan program, untuk itu perlu adanya kejelasan dalam logika manajemen kinerja program Prospek ke depannya.

6. ***Meningkatkan dan memperluas sosialisasi program***

Sosialisasi program tidak sebatas hanya pada pertemuan tatap muka saja, namun perlu juga dilakukan dengan memanfaatkan

berbagai media elektronik dan digital yang ada agar daya jangkauannya lebih jauh dan meluas.

7. ***Menciptakan Mekanisme Perencanaan Berbasis Bukti***

Kualitas input merupakan pondasi dalam sebuah pembangunan. Salah satu hal yang urgen dalam pengelolaan dana OTSUS khususnya Prospek, perlu adanya partisipasi dan transparansi untuk masyarakat kampung. Selain itu juga, perlu ada proporsi penerimaan antara kampung lokal dan kampung yang notabene transmigrasi.

Penutup

6.1. Kesimpulan

1. Kelemahan dalam capaian *input* program sangat memberikan dampak yang luar biasa pada kontribusi dana Prospek terhadap indikator sosial ekonomi di provinsi Papua;
2. Terindikasi program prospek mampu mendorong penurunan kemiskinan di provinsi Papua, walaupun dengan nilai yang cenderung kecil. Hal ini memberikan gambaran masih banyak kampung di provinsi Papua yang belum mengelola Dana prospek sesuai dengan tujuan Prospek.
3. Aspek partisipasi dalam pengelolaan program menjadi suatu dasar dalam peningkatan capaian program ke depan, sehingga perlu adanya keterlibatan seluruh pengelola dan juga masyarakat OAP.

4. Berdasarkan hasil analisis kuantitatif ditemukan beberapa masalah yang cukup fundamental yang menyebabkan rendahnya kontribusi program Prospek terhadap pembangunan sosial ekonomi di wilayah Papua yaitu: (a) pelaksana program/kegiatan yang lebih memperhatikan kuantitas untuk mengejar target tanpa melihat kualitasnya; (b) Juknis (Petunjuk Teknis) yang tidak lengkap sampai pada pelaksanaan kegiatan; (c) kurangnya partisipasi masyarakat OAP dalam pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan; (d) penganggaran yang tidak berkelanjutan karena hanya sebatas pada program/ kegiatan utama; (e) cukup banyaknya pelaksanaan kegiatan kurang memberi manfaat; dan (f) belum adanya *M&E Framework* dan *M&E Plan* sebagai dasar untuk melakukan evaluasi program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkualitas.

6.2. Saran

1. Merujuk kepada hasil evaluasi yang telah dilakukan, maka disarankan Program Prospek Papua perlu dan penting untuk dilanjutkan.
2. Perlu adanya mekanisme perencanaan dan penganggaran yang didasari oleh Semangat OTSUS, karena diketahui Dana Prospek merupakan dana OTSUS.
3. Perlu penguatan pada level distrik dan pendamping dalam mengawal pelaksanaan program Prospek ke depan.
4. Diharapkan adanya pemetaan kegiatan prioritas yang perlu dilaksanakan. Sehingga dana Prospek merupakan basis penerimaan dalam perencanaan dan penganggaran Kampung.
5. Dalam upaya meningkatkan nilai manfaat program Prospek di masa mendatang, maka diperlukan komitmen dan kemauan dari

seluruh pemerintah kabupaten/kota penerima program untuk meningkatkan kualitas kinerja capaian program, meningkatkan dan memperluas Juknis/SOP/Panduan program, mengubah perilaku masyarakat yang material oriented, meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi penganggaran yang berkelanjutan, meningkatkan kemitraan program, memperluas sosialisasi program, menyusun *M&E Framework* serta *M&E Plan*, dan melakukan advokasi untuk mengupayakan Program Prospek dituangkan dalam regulasi daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota penerima program.

Daftar Pustaka

- Asian Development Bank. 2006. *Key Indicator*. Hongkong: Statistics and Data Systems Division, Asian Development Bank, [www.adb.org/statistics].
- BPS Provinsi Papua. 2019. *Papua Dalam Angka Tahun 2019*. Jayapura: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua.
- _____. 2018. *Papua Dalam Angka Tahun 2018*. Jayapura: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua.
- _____. 2017. *Papua Dalam Angka Tahun 2017*. Jayapura: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua.
- Daryanto, A., dan Hafizrianda, Y. 2010. *Metode Kuantitatif Untuk Perencanaan Pembangunan*. Bogor: IPB-Press.
- Deputi BPRDOD RI. 2012. *Pembangunan Daerah Dalam Angka 2012*. Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Bappenas RI.

- Emzir, A.D. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hewitt, Eleanor & Michael Bamberger. 1986. *Monitoring and Evaluating Urban Development Programs*. Washington: World Bank.
- Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2009. *Pedoman Evaluasi Dan Indikator Kinerja Pembangunan*. Jakarta: Bappenas RI.
- Pemerintah Provinsi Papua. 2016. *Penerimaan Dan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Papua Tahun 2002–2015*. Jayapura: Pemerintah Provinsi Papua.
- PERMENPAN dan RB RI. 2011. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor S3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) Dan Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Reformasi Birokrasi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Jakarta.
- KEMENDAGRI RI. 2010. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI.
- Miles, M.B. dan Huberman A.M. 1984, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Salle, A. 2011. “Akuntabilitas Keuangan (Studi Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua)”.
Disertasi. Malang: Program Pascasarjana Universitas Bra-
wijaya.

SEKDA Provinsi Papua. 2013 (a). *Peraturan Daerah Khusus Provinsi
Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan
Dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus*. Jayapura:
Seketaris Daerah Provinsi Papua.

_____. 2013 (b). *Peraturan Daerah Provinsi Papua nomor 14 Tahun
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Da-
erah Provinsi Papua Tahun 2013–2018*. Jayapura: Seketaris
Daerah Provinsi Papua.

SETNEG RI. 2001. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*.
Jakarta: Sekretariat Negara RI.

_____. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.
Jakarta: Sekretariat Negara RI.

_____. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pe-
merintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Per-
aturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerin-
tahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.

_____. 2008. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.


Solihin, Dadang. 2008. “Teknik Penyusunan Indikator Kinerja Pem-
angunan”. BinteK Perencanaan Penganggaran dan Monev


Pembangunan. *Makalah*. Disampaikan untuk Ikatan Widyaiswara Indonesia, Jakarta.

Tarigan, R. 2004. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Lampiran-lampiran

Lampiran 1. Instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Dana Prospek Papua

 <p>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA</p> <p>EVALUASI PENYELENGGARAN PELAKSANAAN PROGRAM PROSPEK TAHUN 2014–2018</p>	
FORM B	
Narasumber/Informan/Responden	OPD Teknis
Kabupaten	
Nama OPD Teknis	
Nomor Urut	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

 <p>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA</p> <p>EVALUASI PENYELENGGARAN PELAKSANAAN PROGRAM PROSPEK PROVINSI PAPUA TAHUN 2014–2018</p>	
A. PENGANTAR	
<p>1. Kegiatan Evaluasi PROSPEK saat ini bukan merupakan suatu inspeksi, audit ataupun pemeriksaan keuangan Dana Otsus, namun, lebih kepada pelaksanaan evaluasi yang berorientasi pada manajemen pencapaian hasil (<i>results-based management</i>), yang dimaksudkan agar efektifitas pengelolaan Dana Otsus, khususnya PROSPEK, dapat dievaluasi dan dinilai hasilnya secara holistik dan komprehensif (<i>aid effectiveness agenda</i>), mulai dari <i>input, proses, output, dan outcome</i>;</p> <p>2. Kegiatan evaluasi ini merupakan hal yang rutin dilaksanakan oleh BAPPEDA Provinsi Papua, namun untuk saat ini menjadi sangat strategis karena hasil evaluasi akan menjadi rujukan terhadap keberlanjutan dari pelaksanaan Program Prospek Papua di masa mendatang;</p> <p>3. Seluruh jawaban yang disampaikan dalam FORM B ini tidak akan dipublikasikan satu per satu (bersifat rahasia), akan tetapi disajikan secara agregat dari seluruh OPD Teknis pelaksana kegiatan sesuai dengan kebutuhan pelaporan evaluasi yang berkualitas dan memenuhi standar.</p>	

B. KETERANGAN

- FORM B** ini merupakan instrumen M&E untuk kegiatan-kegiatan PROSPEK yang dilaksanakan selama periode 2014–2018.
- Isilah pertanyaan dan atau pernyataan di bawah ini sesuai dengan kondisi objektif.
- Pertanyaan dan atau pernyataan yang diajukan ada yang bersifat terbuka dan tertutup. Yang bersifat terbuka dapat langsung diisi sesuai dengan kondisi yang ada, sedangkan yang tertutup jawabannya dapat dipilih (*multiple choice*) dengan memberi tanda lingkaran (O) atau silang (X).
- Agar lembar jawaban **FORM B** ini ditandatangani oleh narasumber/informan/responden atau peserta FGD, dan diketahui oleh Pejabat Bappeda setempat.

C. PROFIL KEGIATAN PENGELOLAAN DANA PROSPEK TAHUN 2014–2018

- | | |
|---|---|
| 1. Teknik Survey Monitoring
(pilih salah satu) | a. Wawancara mendalam
b. FGD (monitoring meja)
c. Penyebaran kuesioner instrumen |
| 2. Kabupaten/Kota/Provinsi | |
| 3. Nama OPD Teknis | |
| 4. Bidang Otsus yang dilaksanakan
(dapat dipilih lebih dari satu, sesuai dengan kondisi riil selama ini) | a. Pendidikan
b. Kesehatan
c. Ekonomi Masyarakat
d. Infrastruktur Dasar
e. Afirmasi |
| 5. Pencapaian Kinerja secara kumulatif * | |

Tahun	Total Kegiatan	Kinerja		
		Pagu Indikatif (Rp.)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
[a]	[b]	[c]	[d]	[e]
2014				
2015				
2016				
2017				
2018				

* Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran (misalkan Renja/RKPD/DPA/dsb)

C. PROFIL KEGIATAN DANA PROSPEK PAPUA 2014–2018.....LANJUTAN**6. Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan**

Program	Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Rata-rata Realisasi Anggaran (%)	Rata-rata Realisasi Fisik (%)
[a]	[b]	[c]	[d]	[e]

a. Pembangunan infrastruktur dasar kampung	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
b. Peningkatan kapasitas SDM melalui pemenuhan makanan dan gizi pendidikan & kesehatan	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
c. Penyediaan sarana/prasarana sosial ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
d. Perluasan kesempatan berwirausaha dan peluang pengembangan usaha bagi masyarakat kurang mampu	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
e. Sarana prasarana, pendidikan dan kesehatan	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
f. Lainnya (tuliskan di bagian "f" ini sekiranya nama program tidak termasuk dalam bagian "a – e")	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			

Catatan:

- Jika kolom dan baris yang disediakan kurang, mohon diketikkan dan dibuatkan format seperti ini, yang kemudian dijadikan lampiran untuk penyampaian profil kegiatan PROSPEK selama tahun 2014–2018;
- Tahun Pelaksanaan: (1) jika dilaksanakan setiap tahun, tuliskan periodenya, misalkan: 2014–2018 berarti dilaksanakan setiap tahun dari 2014 s/d 2018, atau 2014–2015 berarti dilaksanakan setiap tahun selama 2014 s/d 2016; (2) jika dilaksanakan terputus-

putus, gunakan garis miring untuk memisahkan tahunnya, misalkan: 2014/2016 berarti dilaksanakan pada tahun 2014 dan 2016 saja, tahun lainnya tidak;

c. Rata-rata realisasi (anggaran dan fisik): tuliskan perkiraan rata-rata capaian selama tahun dan/atau periode pelaksanaan

D. REGULASI DAN SOP/JUKNIS/JUKLAK PROGRAM

Pernyataan	Jawaban Pilihan	Bukti Verifikasi / Catatan
1. Peraturan yang digunakan/ dirujuk/ diacu dalam penyusunan program/kegiatan PROSPEK di wilayah setempat (dapat dipilih lebih dari 1, sesuai dengan kondisi riil selama ini)	a. Perdasus b. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota c. Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota d. Belum ada regulasi yang terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan	Dokumen regulasi yang dirujuk: <input type="checkbox"/> Semua dapat ditunjukkan <input type="checkbox"/> Hanya sebagian ditunjukkan <input type="checkbox"/> Tidak ada satupun yang ditunjukkan Catatan:
2. SOP/Juklak/Juknis Program PROSPEK yang digunakan/dirujuk/diacu yang mencakup semua aspek pengelolaan program yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, pengendalian, dan Monev	a. Ada, dan lengkap mencakup semua aspek pengelolaan program b. Ada, namun tidak lengkap mencakup semua aspek pengelolaan program c. Ada, namun menggunakan SOP/Juklak/Juknis lain yang terkait d. Tidak ada SOP/Juklak/Juknis yang digunakan selama ini	Dokumen SOP/Juklak/Juknis yang dirujuk: <input type="checkbox"/> Semua dapat ditunjukkan <input type="checkbox"/> Hanya sebagian ditunjukkan <input type="checkbox"/> Tidak ada satupun yang ditunjukkan Catatan:
3. Sosialisasi Peraturan dan SOP/Juknis/Juklak program/kegiatan PROSPEK di wilayah setempat (jika menjawab "d" langsung ke nomor 6)	a. Dilaksanakan setiap tahun pada awal perencanaan program b. Dilaksanakan hanya beberapa tahun c. Dilaksanakan hanya satu kali selama ini d. Tidak pernah disosialisasikan selama ini	Dokumentasi sosialisasi: <input type="checkbox"/> Semua dapat ditunjukkan <input type="checkbox"/> Hanya sebagian ditunjukkan <input type="checkbox"/> Tidak ada satupun yang ditunjukkan

D. REGULASI DAN SOP/JUKNIS/JUKLAK PROGRAMlanjutan

4. Tingkatan sosialisasi Peraturan dan SOP/Juknis/Juklak	a. Dilaksanakan untuk semua OPD dan penerima manfaat	Catatan:
--	--	-------------------

dalam dokumen-dokumen perencanaan	<p>nya selalu tepat sasaran</p> <p>b. Rata-rata untuk semua program/kegiatan tidak setiap tahun tepat sasaran</p> <p>c. Rata-rata untuk semua program/kegiatan hanya dalam 1 atau 2 tahun saja yang tepat sasaran</p> <p>d. Rata-rata untuk semua program/kegiatan tidak ada yang tepat sasaran</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
13. Keterlibatan masyarakat OAP dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan PROSPEK	<p>a. Sangat tinggi</p> <p>b. Tinggi</p> <p>c. Rendah</p> <p>d. Sangat rendah</p> <p>e. Tidak ada keterlibatan masyarakat OAP</p>	
14. Rata-rata tingkat konsistensi penyusunan perencanaan program/kegiatan PROSPEK antar dokumen perencanaan teknis (misalkan: antara RKPK dengan RKPD)	<p>a. Sangat konsisten</p> <p>b. Konsisten</p> <p>c. Tidak konsisten</p> <p>d. Sangat tidak konsisten</p> <p>e. Tidak ada yang konsisten</p>	
15. Pembahasan program/kegiatan PROSPEK dalam Musrenbang menurut tingkatan wilayahnya	<p>a. Di tingkat provinsi, kabupaten/kota, distrik, kelurahan/desa, dan kampung</p> <p>b. Di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan distrik</p> <p>c. Di tingkat provinsi, dan kabupaten/kota</p> <p>d. Di tingkat provinsi</p> <p>e. Tidak pernah dibahas dalam musrenbang</p>	
F. PERENCANAAN PROGRAM/KEGIATAN lanjutan		
16. Ketersediaan rumusan dan penggunaan indikator-indikator pelaksanaan program/kegiatan PROSPEK	<p>a. Ada indikator <i>input</i>, proses, <i>output</i>, <i>outcome</i> dan <i>impact</i></p> <p>b. Ada indikator <i>input</i>, proses, dan <i>output</i></p> <p>c. Ada indikator <i>input</i> dan proses</p> <p>d. Tidak ada indikator yang dirumuskan</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

G. PENGANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN		
17. Termuatnya program/kegiatan PROSPEK dalam dokumen-dokumen penganggaran teknis menurut tingkatan ruang lingkupnya	<p>a. Semua ada dimuat dalam dokumen anggaran di tingkat provinsi, kabupaten, distrik, kelurahan/desa, kampung, dan unit layanan (misalkan:</p>	<p>Dokumen penganggaran yang terkait:</p> <p><input type="checkbox"/> Semua dapat ditunjukkan</p>
	<p>DPA provinsi/ kabupaten/ kota, APB Kampung, RKA Sekolah, dsb.)</p> <p>b. Hanya sebagian dokumen anggaran yang memuat program/kegiatan tersebut</p> <p>c. Hanya ada di dokumen anggaran provinsi/kabupaten/ kota</p> <p>d. Hanya ada di dokumen anggaran provinsi</p>	<p><input type="checkbox"/> Hanya sebagian ditunjukkan</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak ada satupun yang ditunjukkan</p> <p>Catatan:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
18. Rutinitas pengembangan program/kegiatan dalam dokumen penganggaran	<p>a. Rata-rata program/kegiatan PROSPEK secara rutin dimuat dalam dokumen penganggaran</p> <p>b. Rata-rata program/kegiatan PROSPEK tidak rutin dimuat dalam dokumen penganggaran</p> <p>c. Rata-rata program/kegiatan PROSPEK hanya 1 atau 2 tahun saja dimuat dalam dokumen penganggaran</p> <p>d. Program/kegiatan PROSPEK tidak pernah dimuat dalam dokumen penganggaran</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
19. Rata-rata tingkat konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran dalam pengembangan program/kegiatan	<p>a. Sangat konsisten</p> <p>b. Konsisten</p> <p>c. Tidak konsisten</p> <p>d. Sangat tidak konsisten</p> <p>e. Tidak ada yang konsisten</p>	
20. Rata-rata tingkat harmonisasi penganggaran program/kegiatan antara DPA Provinsi dengan DPA Kabupaten/Kota	<p>a. Sangat harmonis</p> <p>b. Harmonis</p> <p>c. Tidak harmonis</p> <p>d. Sangat tidak harmonis</p> <p>e. Tidak ada yang harmonis</p>	

21. Rata-rata tingkat harmonisasi penganggaran program/kegiatan antara DPA Kabupaten/Kota dengan APB Kampung	a. Sangat harmonis b. Harmonis c. Tidak harmonis d. Sangat tidak harmonis e. Tidak ada yang harmonis	
22. Pemenuhan kebutuhan anggaran untuk setiap pelaksanaan program/kegiatan	a. Rata-rata sangat memadai b. Rata-rata memadai c. Rata-rata tidak memadai d. Rata-rata sangat tidak memadai	
H. PENATAUSAHAAN PROGRAM/KEGIATAN		
23. Keterbukaan dalam pengadaan barang dan jasa yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan	a. Sangat terbuka b. Terbuka c. Tertutup d. Tertutup e. Sangat tertutup	Laporan pengadaan barang dan jasa: <input type="checkbox"/> Semua dapat ditunjukkan <input type="checkbox"/> Hanya sebagian ditunjukkan <input type="checkbox"/> Tidak ada satupun yang ditunjukkan Catatan:
24. Pelaksanaan tender dalam pengadaan barang dan jasa yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan	a. Semua kegiatan dilaksanakan melalui tender b. Sebagian kegiatan saja yang dilaksanakan melalui tender c. Hanya sedikit kegiatan yang dilaksanakan melalui tender d. Hanya sedikit kegiatan yang dilaksanakan melalui tender e. Semua kegiatan dilaksanakan tidak pernah melalui tender
25. Pemberdayaan pengusaha OAP dalam pengadaan barang dan jasa yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan	a. Semua pengadaan barang dan jasa untuk pelaksanaan program dilakukan oleh pengusaha OAP b. Sebagian pengadaan barang dan jasa saja yang dilaksanakan oleh pengusaha OAP c. Hanya sedikit pengusaha OAP yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa d. Hanya sedikit pengusaha OAP yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa e. Semua pengadaan barang dan	

	jasa tidak ada yang melibatkan pengusaha OAP	
26. Penggunaan dan laporan pelaksanaan anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk pelaksanaan program/kegiatan	a. Dapat diketahui oleh seluruh pejabat Eselon III pada OPD Teknis b. Hanya sebagian pejabat Eselon III pada OPD Teknis yang dapat mengetahui	Dokumentasi ekspedisi: <input type="checkbox"/> Semua dapat ditunjukkan <input type="checkbox"/> Hanya sebagian ditunjukkan
	c. Tidak dapat diketahui oleh semua pejabat Eselon III pada OPD Teknis	<input type="checkbox"/> Tidak ada satupun yang ditunjukkan Catatan:
27. Publikasi sumber dana program/kegiatan dalam pengadaan barang dan jasa	a. Dipublikasikan dan dapat dilihat oleh seluruh masyarakat OAP b. Hanya dipublikasikan dan dapat dilihat oleh kalangan pemerintah daerah setempat c. Hanya dipublikasikan dan dapat dilihat oleh OPD Teknis pelaksana program/kegiatan d. Tidak dipublikasikan	Dokumentasi publikasi: <input type="checkbox"/> Semua dapat ditunjukkan <input type="checkbox"/> Hanya sebagian ditunjukkan <input type="checkbox"/> Tidak ada satupun yang ditunjukkan Catatan:
28. Publikasi sumber dana program/kegiatan dalam pengadaan barang dan jasa	a. Dipublikasikan dan dapat dilihat oleh seluruh masyarakat OAP b. Hanya dipublikasikan dan dapat dilihat oleh kalangan pemerintah daerah setempat c. Hanya dipublikasikan dan dapat dilihat oleh OPD Teknis pelaksana program/kegiatan d. Tidak dipublikasikan	Dokumentasi publikasi: <input type="checkbox"/> Semua dapat ditunjukkan <input type="checkbox"/> Hanya sebagian ditunjukkan <input type="checkbox"/> Tidak ada satupun yang ditunjukkan Catatan:
29. Ketepatan waktu pencairan dana program/kegiatan	a. Rata-rata setiap saat tepat waktu (tidak pernah terlambat) b. Rata-rata tidak setiap saat tepat waktu (sedikit terlambat) c. Rata-rata tidak tepat waktu (kadang-kadang terlambat) d. Rata-rata tidak pernah tepat waktu (selalu terlambat)	Dokumentasi: <input type="checkbox"/> Semua dapat ditunjukkan <input type="checkbox"/> Hanya sebagian ditunjukkan <input type="checkbox"/> Tidak ada satupun yang ditunjukkan Catatan:

<p>30. Kepatuhan dalam mengikuti skema pencairan dana program/kegiatan</p>	<p>a. Setiap tahun selalu patuh dengan skema pencairan dana program yang diatur</p> <p>b. Tidak setiap tahun mengikuti skema pencairan dana program yang diatur</p> <p>c. Hanya 1 atau 2 tahun saja mengikuti skema pencairan dana program yang diatur</p> <p>d. Setiap tahun tidak pernah mengikuti skema pencairan dana program yang diatur</p>	<p>Dokumentasi:</p> <p><input type="checkbox"/> Semua dapat ditunjukkan</p> <p><input type="checkbox"/> Hanya sebagian ditunjukkan</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak ada satupun yang ditunjukkan</p> <p>Catatan:</p>
<p>31. Terjadinya SILPA dana pelaksanaan program/kegiatan (jika jawab "a" langsung ke nomer 33)</p>	<p>a. Setiap tahun tidak pernah ada SILPA dari penggunaan dana program/kegiatan</p> <p>b. Hanya 1 atau 2 tahun saja pernah ada SILPA dari penggunaan dana program/kegiatan</p> <p>c. Hampir setiap tahun ada SILPA dari penggunaan dana program/kegiatan</p> <p>d. Setiap tahun selalu ada SILPA dari penggunaan dana program/kegiatan</p>	<p>Dokumentasi:</p> <p><input type="checkbox"/> Semua dapat ditunjukkan</p> <p><input type="checkbox"/> Hanya sebagian ditunjukkan</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak ada satupun yang ditunjukkan</p> <p>Catatan:</p>
<p>32. Penggunaan SILPA dana dari pelaksanaan program/kegiatan untuk tahun berikutnya (dinilai untuk rata-rata setiap tahun)</p>	<p>a. Dianggarkan kembali semua untuk melaksanakan program/kegiatan yang sama</p> <p>b. Tidak semuanya dianggarkan kembali untuk melaksanakan program/kegiatan yang sama</p> <p>c. Hanya sebagian yang dianggarkan kembali untuk melaksanakan program/kegiatan yang sama</p> <p>d. Semua tidak dianggarkan kembali untuk melaksanakan program/kegiatan yang sama</p>	<p>Dokumentasi:</p> <p><input type="checkbox"/> Semua dapat ditunjukkan</p> <p><input type="checkbox"/> Hanya sebagian ditunjukkan</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak ada satupun yang ditunjukkan</p> <p>Catatan:</p>
I. PELAPORAN PROGRAM/KEGIATAN		
<p>33. Ketersediaan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan jika dilihat menurut pihak yang menyusun laporan</p>	<p>a. Pelaksana program/kegiatan di tingkat provinsi</p> <p>b. Pelaksana program/kegiatan di tingkat kabupaten/kota</p>	<p>Dokumentasi Laporan:</p> <p><input type="checkbox"/> Semua dapat ditunjukkan</p>

<p>(dapat dipilih lebih dari 1 jawaban, sesuai dengan kondisi riil selama ini)</p> <p>(jika jawab “f” langsung ke nomer 35)</p>	<p>c. Pelaksana program/kegiatan di tingkat distrik</p> <p>d. Pelaksana program/kegiatan di tingkat kelurahan/desa, dan kampung</p> <p>e. Pelaksana program/kegiatan di tingkat tenaga pendamping</p> <p>f. Tidak pernah ada laporan</p>	<p><input type="checkbox"/> Hanya sebagian ditunjukkan</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak ada satupun yang ditunjukkan</p> <p>Catatan:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>34. Rutinitas Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan gungjawaban pelaksanaan program/kegiatan</p>	<p>a. Setiap tahun dibuatkan laporan pertanggungjawaban</p> <p>b. Tidak setiap tahun dibuatkan laporan pertanggungjawaban</p> <p>c. Hanya dalam 1 atau 2 tahun saja pernah dibuatkan laporannya</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
J. PENGAWASAN PROGRAM/KEGIATAN		
<p>35. Bentuk pelaksanaan pengawasan internal program/kegiatan PROSPEK</p> <p>(jika jawab “d” langsung ke nomer 37)</p>	<p>a. Pengawasan dilakukan oleh pihak internal (misalkan Inspektorat) tingkat provinsi dan kabupaten/kota</p> <p>b. Pengawasan dilakukan oleh pihak internal (misalkan Inspektorat) tingkat provinsi</p> <p>c. Pengawasan dilakukan oleh pihak internal (misalkan Inspektorat) tingkat kabupaten/kota</p> <p>d. Tidak pernah ada pengawasan internal</p>	<p>Dokumentasi:</p> <p><input type="checkbox"/> Semua dapat ditunjukkan</p> <p><input type="checkbox"/> Hanya sebagian ditunjukkan</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak ada satupun yang ditunjukkan</p> <p>Catatan:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>36. Rutinitas pelaksanaan pengawasan internal program/kegiatan PROSPEK</p>	<p>a. Setiap tahun</p> <p>b. Tidak setiap tahun</p> <p>c. Jarang dilakukan</p> <p>d. Hanya 1 atau 2 tahun saja</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>37. Tersedianya wadah aduan dari masyarakat OAP terhadap pelaksanaan program/kegiatan PROSPEK</p>	<p>a. Setiap tahun selalu disediakan</p> <p>b. Tidak setiap tahun disediakan</p> <p>c. Hanya dalam 1 atau 2 tahun saja pernah disediakan</p> <p>d. Tidak pernah disediakan selama ini</p>	<p>Dokumentasi warga melakukan pengaduan:</p> <p><input type="checkbox"/> Semua dapat ditunjukkan</p> <p><input type="checkbox"/> Hanya sebagian ditunjukkan</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak ada satupun yang ditunjukkan</p>

38. Partisipasi masyarakat OAP dalam mengawasi pelaksanaan program/kegiatan PROSPEK	a. Sangat tinggi b. Tinggi c. Rendah d. Sangat rendah e. Tidak berpartisipasi	Catatan:
K. MONITORING DAN PENGENDALIAN		
39. Adanya monitoring dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan PROSPEK	a. Setiap tahun selalu dilakukan monitoring dan pengendalian program/kegiatan b. Tidak setiap tahun dilakukan monitoring dan pengendalian program/kegiatan c. Hanya dalam 1 atau 2 tahun	Dokumen Laporan Monitoring & Pengendalian program: <input type="checkbox"/> Semua dapat ditunjukkan <input type="checkbox"/> Hanya sebagian ditunjukkan
	saja pernah dilakukan monitoring dan pengendalian program/kegiatan d. Hanya 1 tahun dilakukan monitoring dan pengendalian program/kegiatan e. Tidak pernah dilakukan monitoring dan pengendalian program/kegiatan	<input type="checkbox"/> Tidak ada satupun yang ditunjukkan Catatan:
40. Pelaksana monitoring dan pengendalian program/kegiatan PROSPEK	a. Bappeda Provinsi, Bappeda Kabupaten/Kota, dan OPD Teknis b. Bappeda Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota c. Bappeda Provinsi	
41. Bentuk pelaksanaan monitoring dan pengendalian program/kegiatan PROSPEK	a. Sangat lengkap b. Lengkap c. Tidak lengkap d. Sangat tidak lengkap	

(secara lengkap mencakup laporan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, proses, penatausahaan, hasil)		
42. Tindak lanjut dari hasil monitoring dan pengendalian program/kegiatan PROSPEK	<ul style="list-style-type: none"> a. Selalu ditindaklanjuti oleh pelaksana program/kegiatan b. Tidak selalu ditindaklanjuti oleh pelaksana program/kegiatan c. Jarang atau sekali-kali saja ditindaklanjuti oleh pelaksana program/kegiatan d. Tidak pernah ditindaklanjuti oleh pelaksana program/kegiatan 	
43. Publikasi hasil monitoring dan pengendalian program/kegiatan PROSPEK	<ul style="list-style-type: none"> a. Selalu dipublikasikan b. Tidak selalu dipublikasikan c. Jarang atau sekali-kali saja dipublikasikan d. Tidak pernah dipublikasikan 	Dokumentasi publikasi: <input type="checkbox"/> Semua dapat ditunjukkan <input type="checkbox"/> Hanya sebagian ditunjukkan <input type="checkbox"/> Tidak ada satupun yang ditunjukkan Catatan:
44. Keterlibatan masyarakat OAP dalam melakukan monitoring dan pengendalian program/kegiatan PROSPEK	<ul style="list-style-type: none"> a. Masyarakat OAP selalu dilibatkan b. Masyarakat OAP tidak selalu dilibatkan c. Masyarakat OAP jarang dilibatkan d. Masyarakat OAP tidak pernah dilibatkan 	Dokumentasi warga mengikuti monitoring: <input type="checkbox"/> Semua dapat ditunjukkan <input type="checkbox"/> Hanya sebagian ditunjukkan <input type="checkbox"/> Tidak ada satupun yang ditunjukkan Catatan:

L. VALIDASI DAN VERIFIKASI UNTUK FGD

Mohon ditandatangani peserta FGD pada kolom yang disediakan, setelah disepakati bersama hasil pengisian **FORM A** ini. Dapat ditambahkan dengan lampiran peserta FGD.

a. Tempat Pelaksanaan FGD	
---------------------------	--

b. Tanggal Pelaksanaan FGD			
c. Waktu Pelaksanaan FGD	 – wit	
Nama Peserta	OPD	Jabatan	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Diverifikasi oleh:		Diketahui oleh:	
(.....)		(.....)	
Nama Tim Evaluator		Pejabat Bappeda Setempat	

M. VALIDASI DAN VERIFIKASI UNTUK NARASUMBER/INFORMAN/RESPONDEN

Mohon identitas diisi dan ditandatangani oleh narasumber/informan/responden pada kolom yang disediakan.

Nama		
OPD		
Jabatan		
Pendidikan	a. SLTA dan sederajat	b. Diploma/S1 c. S2/S3
Jenis Kelamin	a. Laki-Laki	b. Perempuan
Alamat Kantor PD		
Tempat/Waktu Pengisian Kuesioner	Di	Hari/tanggal

Lampiran 2. Dana Prospek Provinsi Papua 2016-2018

KAB/KOTA	2016	2017	2018	Total 2016-2018	Proporsi
ASMAT	17.234.334.000	21.983.975.000	20.938.645.000	60.156.954.000	3,79
BIAK NUMFOR	23.469.955.000	26.659.300.000	25.416.538.000	75.545.793.000	4,76
BOVEN DIGOEL	14.437.498.000	11.141.200.000	10.611.440.000	36.190.138.000	2,28
DEIYAI	4.709.868.000	6.664.825.000	6.347.915.000	17.722.608.000	1,12
DOGIYAI	10.078.680.000	7.858.525.000	7.484.855.000	25.422.060.000	1,60
INTAN JAYA	9.599.400.000	9.649.075.000	9.190.265.000	28.438.740.000	1,79
JAYAPURA	16.846.190.000	14.324.400.000	13.652.165.000	44.822.755.000	2,82
JAYAWIJAYA	27.083.694.000	33.025.700.000	31.462.448.000	91.571.842.000	5,77
KEEROM	7.765.885.000	9.052.225.000	8.621.795.000	25.439.905.000	1,60
KEP. YAPEN	16.448.879.000	16.413.375.000	15.641.810.000	48.504.064.000	3,05
KOTA JAYAPURA	5.063.031.000	3.780.050.000	3.838.965.000	12.682.046.000	0,80
LANI JAYA	17.773.384.000	35.313.625.000	33.636.252.000	86.723.261.000	5,46
MAMBERAMO RAYA	8.015.537.000	6.863.775.000	5.495.210.000	20.374.522.000	1,28
MAMBERAMO TENGAH	7.374.106.000	5.869.025.000	5.589.955.000	18.833.086.000	1,19
MAPPI	18.307.286.000	16.313.900.000	15.541.734.000	50.162.920.000	3,16
MERAUKE	21.349.662.000	18.900.250.000	18.021.097.000	58.271.009.000	3,67
MIMIKA	20.229.742.000	15.120.200.000	14.435.003.000	49.784.945.000	3,13

NABIRE	12.030.941.000	8.057.475.000	7.690.338.000	27.778.754.000	1,75
NDUGA	4.720.928.000	24.669.800.000	23.496.760.000	52.887.488.000	3,33
PANIAI	11.509.387.000	21.983.975.000	20.464.920.000	53.958.282.000	3,40
PEG. BINTANG	36.232.960.000	27.554.575.000	26.244.365.000	90.031.900.000	5,67
PUNCAK	10.399.360.000	20.491.850.000	19.517.470.000	50.408.680.000	3,17
PUNCAK JAYA	36.609.000.000	30.339.875.000	28.902.556.000	95.851.431.000	6,03
SARMI	8.352.322.000	9.350.650.000	8.909.584.000	26.612.556.000	1,68
SUPIORI	4.945.575.000	3.780.050.000	3.600.310.000	12.325.935.000	0,78
TOLIKARA	66.954.774.000	54.213.875.000	51.643.133.000	172.811.782.000	10,88
YAHUKIMO	64.914.545.000	50.831.725.000	48.416.472.000	164.162.742.000	10,34
YALIMO	3.671.312.000	29.842.500.000	28.423.500.000	61.937.312.000	3,90
WAROPEN	9.468.740.000	9.947.500.000	9.474.500.000	28.890.740.000	1,82
TOTAL	515.596.975.000	549.997.275.000	522.710.000.000	1.588.304.250.000	100,00

Sumber: Bappeda Provinsi Papua (2019)

Lampiran 3. Data Pembentukan Model Data Panel

KAB./KOTA	TAHUN	PROSPEK	KEMISKINAN			IPM	LPE	IPD	% MAN- DIRI	% BER- KEMBANG TINGGAL	% TER- TINGGAL
			DESA	KOTA	DESA+KOTA						
Asmat	2014				29,10	45,91	5,47	27,69	-	0,45	99,55
Blak Numfor	2014				27,44	70,32	5,29	43,78	-	26,88	73,12
Boven Digoel	2014				18,87	58,21	6,13	30,34	-	6,25	93,75
Deiyai	2014				44,49	48,12	11,52	33,79	-	-	100,00
Dogiyai	2014				29,10	52,25	9,10	33,24	-	5,06	94,94
Intan Jaya	2014				38,16	43,51	10,70	24,93	-	-	100,00
Jayapura	2014				14,18	69,55	11,27	47,36	0,72	41,01	58,27
Jayawijaya	2014				39,60	53,37	7,07	34,54	-	6,71	93,29
Keerom	2014				19,12	62,73	8,79	41,89	1,1	21,98	76,92
Kep. Yapen	2014				26,39	64,89	6,93	36,77	-	15,53	84,47
Kota Jayapura	2014				12,21	77,86	10,19	63,26	7,69	84,62	7,69
Lani Jaya	2014				39,26	43,28	7,45	34,32	-	0,56	99,44
Mamberamo Raya	2014				29,86	47,88	9,72	27,52	-	1,45	98,55
Mamberamo Tengah	2014				35,47	43,19	8,80	30,37	-	-	100,00
Mappi	2014				25,95	55,74	8,26	29,32	-	4,32	95,68

Merauke	2014				10,20	67,33	7,74	46,47	0,55	40,33	59,12
Mimika	2014				16,11	70,40	-0,55	33,23	0,75	15,79	83,46
Nabire	2014				23,92	66,25	7,15	47,52	-	45,83	54,17
Nduga	2014				35,89	25,38	9,48	19,71	-	-	100,00
Paniai	2014				36,07	53,93	8,69	37,75	-	12,99	87,01
Peg. Bintang	2014				32,78	39,68	6,36	22,44	-	1,08	98,92
Puncak	2014				37,85	38,05	9,40	21,54	-	-	100,00
Puncak Jaya	2014				36,15	44,32	4,40	24,56	-	1,32	98,68
Sarmi	2014				13,32	60,48	6,76	36,59	-	15,22	84,78
Supiori	2014				36,65	59,70	6,46	48,32	-	47,37	52,63
Tolikara	2014				33,27	46,16	6,72	20,35	-	0,18	99,82
Yahukimo	2014				39,02	46,36	7,03	25,43	-	0,78	99,22
Yalimo	2014				35,65	44,21	9,83	29,3	-	1,34	98,66
Waropen	2014				32,63	61,97	10,47	33,62	-	5,00	95,00
Asmat	2015				28,48	46,62	4,79	-	-	-	-
Biak Numfor	2015				27,23	70,85	6,62	-	-	-	-
Boven Digoel	2015				19,50	59,02	5,39	-	-	-	-
Deiyai	2015				45,74	48,28	12,87	-	-	-	-
Dogiyai	2015				29,10	52,78	8,29	-	-	-	-
Intan Jaya	2015				41,34	44,35	10,09	-	-	-	-
Jayapura	2015				14,69	70,04	9,95	-	-	-	-

Jayawijaya	2015					39,48	54,18	6,28	-	-	-	-
Keerom	2015					15,83	63,43	7,02	-	-	-	-
Kep. Yapen	2015					27,70	65,28	6,26	-	-	-	-
Kota Jayapura	2015					12,22	78,05	8,48	-	-	-	-
Lani Jaya	2015					41,97	44,18	6,60	-	-	-	-
Mamberamo Raya	2015					29,71	48,29	10,30	-	-	-	-
Mamberamo Tengah	2015					35,54	43,55	6,35	-	-	-	-
Mappi	2015					26,96	56,11	6,85	-	-	-	-
Merauke	2015					11,10	67,75	6,88	-	-	-	-
Mimika	2015					16,20	70,89	6,48	-	-	-	-
Nabire	2015					24,37	66,49	7,52	-	-	-	-
Nduga	2015					35,89	25,47	7,71	-	-	-	-
Paniai	2015					37,43	54,20	9,82	-	-	-	-
Peg. Bintang	2015					31,55	40,91	5,94	-	-	-	-
Puncak	2015					38,74	39,41	9,43	-	-	-	-
Puncak Jaya	2015					37,45	44,87	7,39	-	-	-	-
Sarmi	2015					13,85	60,99	6,99	-	-	-	-
Supiori	2015					39,25	60,09	4,25	-	-	-	-
Tolikara	2015					34,00	46,38	4,87	-	-	-	-
Yahukimo	2015					41,26	46,63	7,14	-	-	-	-
Yalimo	2015					35,88	44,32	8,88	-	-	-	-

Peg. Bintang	2016	36.232.960.000	-	-	31,52	41,90	6,49	-	-	-	-
Puncak	2016	10.399.360.000	-	-	38,58	39,96	7,32	-	-	-	-
Puncak Jaya	2016	36.609.000.000	-	-	37,31	45,49	4,60	-	-	-	-
Sarmi	2016	8.352.322.000	-	-	13,74	61,27	6,71	-	-	-	-
Supiori	2016	4.945.575.000	-	-	37,99	60,59	4,43	-	-	-	-
Tolikara	2016	66.954.774.000	-	-	33,63	47,11	4,58	-	-	-	-
Yahukimo	2016	64.914.545.000	-	-	40,62	47,13	4,61	-	-	-	-
Yalimo	2016	3.671.312.000	-	-	35,80	44,95	6,83	-	-	-	-
Waropen	2016	9.468.740.000	-	-	31,25	63,10	9,46	-	-	-	-
Asmat	2017	21.983.975.000	-	-	27,16	48,49	5,83	-	-	-	-
Blak Numfor	2017	26.659.300.000	-	-	25,44	71,56	4,58	-	-	-	-
Boven Digoel	2017	11.141.200.000	-	-	19,90	60,14	4,07	-	-	-	-
Deiyai	2017	6.664.825.000	-	-	43,63	49,07	4,67	-	-	-	-
Dogiyai	2017	7.858.525.000	-	-	30,36	54,04	5,88	-	-	-	-
Intan Jaya	2017	9.649.075.000	-	-	42,23	45,68	3,66	-	-	-	-
Jayapura	2017	14.324.400.000	-	-	13,01	70,97	7,03	-	-	-	-
Jayawijaya	2017	33.025.700.000	-	-	38,62	55,99	5,51	-	-	-	-
Keerom	2017	9.052.225.000	-	-	16,69	64,99	4,85	-	-	-	-
Kep. Yapen	2017	16.413.375.000	-	-	26,82	66,07	4,64	-	-	-	-
Kota Jayapura	2017	3.780.050.000	-	-	11,46	79,23	6,02	-	-	-	-
Lani Jaya	2017	35.313.625.000	-	-	39,60	46,49	5,39	-	-	-	-

Mamberamo Raya	2017	6.863.775.000	-	-	29,88	50,25	6,45	-	-	-	-	-
Mamberamo Tengah	2017	5.869.025.000	-	-	36,38	45,50	5,66	-	-	-	-	-
Mappi	2017	16.313.900.000	-	-	25,75	57,10	7,03	-	-	-	-	-
Merauke	2017	18.900.250.000	-	-	10,81	68,64	7,46	-	-	-	-	-
Mimika	2017	15.120.200.000	-	-	14,89	72,42	3,72	-	-	-	-	-
Nabire	2017	8.057.475.000	-	-	25,38	67,11	6,40	-	-	-	-	-
Nduga	2017	24.669.800.000	-	-	37,29	27,87	7,25	-	-	-	-	-
Paniai	2017	21.983.975.000	-	-	37,40	54,91	4,84	-	-	-	-	-
Peg. Bintang	2017	27.554.575.000	-	-	30,60	43,24	6,05	-	-	-	-	-
Puncak	2017	20.491.850.000	-	-	37,46	41,06	6,67	-	-	-	-	-
Puncak Jaya	2017	30.339.875.000	-	-	36,01	46,57	3,73	-	-	-	-	-
Sarmi	2017	9.350.650.000	-	-	13,75	62,31	7,10	-	-	-	-	-
Supiori	2017	3.780.050.000	-	-	37,40	61,23	4,01	-	-	-	-	-
Tolikara	2017	54.213.875.000	-	-	32,73	47,89	4,60	-	-	-	-	-
Yahukimo	2017	50.831.725.000	-	-	39,33	47,95	6,09	-	-	-	-	-
Yalimo	2017	29.842.500.000	-	-	34,97	46,19	5,19	-	-	-	-	-
Waropen	2017	9.947.500.000	-	-	30,82	64,08	7,72	-	-	-	-	-
Asmat	2018	20.938.645.000	-	-	27,41	49,37	5,72	30,61	-	1,36	98,64	-
Blak Numfor	2018	25.416.538.000	-	-	25,72	71,96	0,42	49,24	-	46,06	53,94	-
Boven Digoel	2018	10.611.440.000	-	-	20,35	60,83	3,44	35,53	-	9,09	90,91	-
Deiyai	2018	6.347.915.000	-	-	43,49	49,55	3,57	43,05	-	31,34	68,66	-

Dogiyai	2018	7.484.855.000	-	-	30,48	54,44	5,86	33,3	-	2,53	97,47
Intan Jaya	2018	9.190.265.000	-	-	42,71	46,55	2,79	27,89	-	1,03	98,97
Jayapura	2018	13.652.165.000	-	-	13,44	71,25	7,74	51,89	0,72	54,68	44,60
Jayawijaya	2018	31.462.448.000	-	-	38,66	56,82	6,34	39,18	-	16,21	83,79
Keerom	2018	8.621.795.000	-	-	16,90	65,75	4,19	44,97	4,4	30,77	64,84
Kep. Yapen	2018	15.641.810.000	-	-	27,17	67,00	4,55	44,67	-	33,75	66,25
Kota Jayapura	2018	3.838.965.000	-	-	11,37	79,58	5,45	66,02	7,14	92,86	0,00
Lani Jaya	2018	33.636.252.000	-	-	40,06	47,34	5,27	33,74	-	2,25	97,75
Mamberamo Raya	2018	5.495.210.000	-	-	30,10	51,24	5,90	34,24	-	11,86	88,14
Mamberamo Tengah	2018	5.589.955.000	-	-	37,02	46,41	5,11	36,42	-	10,17	89,83
Mappi	2018	15.541.734.000	-	-	25,64	57,72	6,31	36,24	0,62	6,17	93,21
Merauke	2018	18.021.097.000	-	-	10,54	69,38	8,11	50,25	-	53,07	46,93
Mimika	2018	14.435.003.000	-	-	14,55	73,15	10,35	37,45	0,75	23,31	75,94
Nabire	2018	7.690.338.000	-	-	25,17	67,70	5,89	48,03	2,5	45,00	52,50
Nduga	2018	23.496.760.000	-	-	38,13	29,42	5,74	26,95	-	0,40	99,60
Paniai	2018	20.464.920.000	-	-	37,35	55,83	6,49	34,17	-	8,33	91,67
Peg. Bintang	2018	26.244.365.000	-	-	30,75	44,22	5,39	29,16	-	1,08	98,92
Puncak	2018	19.517.470.000	-	-	38,15	41,81	6,72	27,64	-	0,97	99,03
Puncak Jaya	2018	28.902.556.000	-	-	36,27	47,39	4,65	28,03	-	0,66	99,34
Sarmi	2018	8.909.584.000	-	-	14,51	63,00	6,24	44,36	-	36,11	63,89
Supiori	2018	3.600.310.000	-	-	39,22	61,84	4,18	53,1	-	60,53	39,47

Tolikara	2018	51.643.133.000	-	-	33,14	48,85	4,63	26,1	-	0,18	99,82
Yahukimo	2018	48.416.472.000	-	-	39,25	48,51	5,56	27,96	-	0,58	99,42
Yalimo	2018	28.423.500.000	-	-	35,45	47,13	6,49	32,23	-	2,33	97,67
Waropen	2018	9.474.500.000	-	-	30,53	64,80	7,18	37,63	-	19,66	80,34

Lampiran 4. Estimasi Model Data Panel

Variabel	IPM (indeks)		KEMISKINAN (%)		PENDAPATAN PER KAPITA (Rp juta)		INDEKS PEMBANGUNAN DESA (indeks)	
	Coefficient	p-value	Coefficient	p-value	Coefficient	p-value	Coefficient	p-value
C	43,6675	0,0000	39,1424	0,0000	57,6830	0,0698	68,0922	0,0072
Ln PROSPEK?	0,5157	0,1222	-0,4104	0,0864	-0,9398	0,4569	-1,3977	0,1893
Random Effects (Cross)								
ASM--C	-7,4935		-1,9541		-20,5976		-6,0405	
BNF--C	15,5062		-3,2608		-11,7009		10,5594	
BDG--C	4,4660		-9,2524		11,1619		-3,4527	
DYI--C	-6,2125		14,1464		-25,7480		0,2076	
DGY--C	-1,5149		0,9177		-27,7905		-2,7821	
ITJ--C	-9,8124		13,1595		-21,1290		-9,6822	
JYP--C	15,1341		-16,1977		33,1062		12,9988	
JYW--C	-0,1907		9,7320		-14,9215		1,6660	
KRM--C	9,4751		-12,8332		-2,8053		6,5149	

YAP--C	10,3998		-2,3166		-7,7671		4,0058
KJP--C	23,9887		-18,3986		33,4143		26,0188
LNJ--C	-9,7177		11,1577		-29,1180		-0,3478
MBR--C	-5,1627		-0,0233		3,7623		-6,4498
MBT--C	-9,9259		7,3575		-22,1281		-4,0236
MAP--C	1,3130		-3,4690		-18,1615		-3,4308
MER--C	12,7988		-18,5899		4,4544		12,2572
MMK--C	16,5778		-14,7526		291,1212		-0,5584
NBR--C	11,6390		-4,2016		10,3206		11,1982
NDG--C	-27,7146		8,3981		-28,3822		-12,8071
PAN--C	-0,7954		8,4819		-19,3646		1,3595
PGB--C	-12,9591		1,7083		-17,6110		-9,3361
PCK--C	-14,8161		8,5552		-28,7488		-11,2250
PJY--C	-9,6366		7,3029		-27,3668		-8,2481
SAR--C	6,7030		-15,7242		6,2394		2,9831
SUP--C	6,1321		8,1316		-0,3866		12,2590

TLK--C	-8,4753		4,1846		-27,2468		-10,7754
WAR--C	8,4571		1,1567		8,9270		-0,9671
YAH--C	-8,5344		10,7218		-27,0491		-6,9937
YAL--C	-9,6289		5,8621		-24,4840		-4,9080
R-squared	0,0274		0,0342		0,0066		0,0189
R-determinant	0,0007		0,0012		0,0000		0,0004
Adjusted R-squared	0,0159		0,0228		-0,0051		0,0073
F-statistic	2,3925		3,0065		0,5633		1,6353
Prob(F-statistic)	0,1256		0,0866		0,4550		0,2045

